



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI**

- Tahun Sidang : 2019 – 2020
Masa Persidangan : II
Rapat ke : -
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Kepala Kepolisian RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Kamis, 30 Januari 2020
Pukul : 10.00 WIB – 13.15 WIB
Tempat : RR Komisi III, Gd. Nusantara 2 lantai 2
Ketua Rapat : Herman Herry
Sekretaris : Novianti, S.E.
Acara : 1) Rencana Kerja Tahun 2020
2) Tindak Lanjut Penanganan Kasus Novel Baswedan, penanganan kasus Natuna, penanganan kasus Taman Sari
3) Lain-lain,
Hadir : A. Anggota DPR RI :
44 dari 53 orang Anggota dengan rincian:

PIMPINAN

4 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Herman Herry
2. H.Desmond Junaidi. M., SH.,MH
3. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum
4. H. Ahmad Sahroni, SE

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

11 orang dari 11 orang Anggota:

1. M. Nurdin
2. Bambang DH
3. Trimedya Panjaitan
4. Arteria Dahlan
5. Masinton Pasaribu
6. Ichsan Soelistio
7. Wayan Sudirta
8. H. Safaruddin
9. Agustiar Sabran
10. Marinus Gea
11. H. Mohammad Idham Samawi

/11. H. Mohammad Idham Samawi

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH., M.Kn.
2. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si.
3. Supriansa, S.H., M.H.

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

6 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Habiburokhman, SH., MH
2. Romo H.R. Muhammad Syafi'i., SH., M.Hum
3. Wihadi Wiyanto, SH., MH.
4. H. Rahmat Muhajirin, SH.
5. M. Husni, SE., MM.
6. Bambang Haryadi, SE.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Taufik Basari, SH., M.Hum., LL.M
2. Eva Yuliana, M.Si.
3. Ary Egahni Ben Bahat, SH

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

5 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Luqman Hakim, S.Ag
2. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P
3. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA.
4. N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn.
5. H. Moh. Rano Al Fath, SH., MH.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

5 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Ir. H. Mulyadi
2. H. Santoso, SH
3. Dr. Hinca Ip Pandjaitan XIII, SH., MH., ACCS
4. Didik Mukrianto, SH., MH.
5. Dr. Benny Kabur Harman, SH.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsy.,SE
2. H.Muhammad Nasir Djamil.,M.Si
3. DR. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, SH., MH

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Pangeran Khairul Saleh
2. Sarifuddin Sudding, SH., MH.
3. H. Nazaruddin Dek Gam

/3. H. Nazaruddin Dek Gam

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. H.Arsul Sani.,SH.,M.Si

Jalannya rapat:

KETUA RAPAT/F.PDI-P (HERMAN HERY):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om swastyastu om namo buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang terhormat Pimpinan Komisi III dan seluruh Anggota Komisi III yang hadir di ruangan ini,

Yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia,

Beserta seluruh Pejabat Utama Para Kasatil yang hadir,

Beserta seluruh Anggota yang hadir pada pagi hari ini,

Pertama-tama marilah memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan laporan dari Sekretariat, rapat kerja hari ini berdasarkan daftar hadir yang telah ada telah hadir sebanyak 32 dari 53 Anggota Komisi III dari 9 Fraksi. Oleh karena itu kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib maka perkenankan kami membuka rapat kerja ini dan rapat kerja dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih Kapolri beserta seluruh jajarannya atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat kerja pada hari ini. Kami juga mengundang beberapa Kapolda antara lain Kapolda Jawa Timur dalam rapat hari ini. Selamat datang bagi Pak Kapolda Jawa Timur, Kapolda Sulsel dan beberapa Kapolda yang lain, maksud kami mengundang para Kapolda untuk ikut hadir dalam rapat kerja ini agar jika ada pertanyaan-pertanyaan menyangkut wilayahnya para Kapolda bisa menjawab secara langsung.

Selanjutnya Pimpinan menawarkan dan meminta persetujuan mengenai acara rapat kerja hari ini yaitu:

1. Mendengarkan penjelasan Kapolri mengenai pertanyaan tertulis yang telah diberikan oleh Komisi III DPR RI kepada Kapolri,
2. Tanya jawab,
3. Kesimpulan,
4. Penutup,

Kami juga ingin mendapatkan persetujuan dari seluruh Anggota yang hadir. Apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 13.00 WIB. Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Demikian pengantar kami dan untuk mempersingkat waktu kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada Saudara Kapolri untuk menyampaikan penjelasannya, kami persilakan.

KAPOLRI (Drs. IDHAM AZIS, M.Si):

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian,

Om swastyastu om namo buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati serta saya banggakan Bapak Pimpinan Komisi III DPR RI Republik Indonesia,
Para Wakil Pimpinan Komisi III DPR RI,
Para Anggota Komisi III DPR RI,
Bapak Wakapolri, Irwasum,
Serta para PGU dan Kapolda yang saya hormati,
Serta hadirin sekalian yang saya muliakan,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah *Subhanahu Wa ta'ala* Tuhan Yang Maha Besar, karena atas limpahan dan karuniaNya hari ini kita bisa berkumpul di ruang yang mulia ini untuk mengikuti RDP yang kedua dimasa Kepemimpinan saya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Komisi III atas undangan ini dan sekaligus permohonan maaf yang tadinya harus dilaksanakan tanggal 29 kemarin, karena kami masih mengikuti rangkaian Rapim TNI Polri sehingga baru bisa terlaksana hari ini. Kami juga menghaturkan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran Bapak Ketua Komisi III beserta Pimpinan yang lain pada saat Rapim Polri kemarin yang mana sekaligus sebagai motivasi bagi Institusi Polri ini untuk terus berbuat yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelum saya membacakan *executive summary* jawaban atas pertanyaan yang dikirim izinkanlah saya di ruangan yang mulia ini memperkenalkan beberapa pejabat baru yang mengisi posisi di struktural Polri.

1. Bapak Wakapolri Pak Komjen Gatot Eddy Pramono selaku Bapak Wakapolri,
2. Bapak Kabarkham Polri, sebelumnya beliau Kapolda Medan,
3. Bapak Kabreskrim Polri sebelumnya Kadiv Propam Komjen Sigit,
4. Aslog Kapolri Bapak Irjen Dofiri, sebelumnya beliau Kapolda Yogyakarta,
5. Asrena Kapolri Irjen Hendro, sebelumnya Karorenmin di Bareskrim,

Mohon maaf Bapak Kapolda Metro harusnya hadir, namun hari ini ada kegiatan protap waskita di Tangerang sehingga diwakili oleh Bapak Wakil

Kapolda Metro. Beberapa Kapolda kami hadirkan sesuai permintaan rekan-rekan Komisi III diantaranya:

- Kapolda Jatim Irjen Luki,
- Kapolda Sulsel,
- Kapolda Sumbar Pak Toni dan,
- Wakapolda Metro,

Bapak Ketua yang kami hormati,

Izinkan kami membacakan dalam waktu singkat pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada kami, yang pertama tentang tindaklanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan dalam RDP sebelumnya. Kami telah menerima 40 surat pengaduan, 20 surat pengaduan tidak dilanjutkan karena tidak ada lampiran dan tidak berkadar pengawasan, lalu 20 surat ditindaklanjuti dengan hasil 5 pengaduan tidak benar dan 15 pengaduan masih dalam proses.

Kemudian ada permintaan dari Komisi III meminta Kapolri menjunjung tinggi netralitas, menjaga integritas Polri dalam menghadapi Pilkada serentak. Kami sudah membentuk tim gabungan untuk memonitoring evaluasi dan asistensi, lalu menerbitkan surat telegram kepada jajaran tentang 14 poin netralitas Anggota Polri, menerbitkan buku saku Polri tentang netralitas sehingga seluruh Anggota Polri yang melaksanakan pengamanan mereka mempunyai buku panduan. Kami juga menyiapkan nomor *hotline* dan *website* sebagai layanan pengaduan masyarakat dan berkomitmen menindak tegas Anggota Polri yang tidak netral dalam Pilkada serentak sesuai dengan Perkab Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesional Polri.

Nomor dua, Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar dalam proses pembinaan karir di lingkungan Polri dilakukan secara terencana, objektif dan prosedural. Dalam program prioritas Kapolri mewujudkan SDM yang unggul, pembinaan karir personal berbasis meritokrasi dan kompetensi di implementasikan melalui kegiatan promosi jabatan terbuka dan itu sudah kita lakukan sejak tiga tahun terakhir ini untuk jabatan pada tingkat Mabes kemudian juga untuk jabatan tingkat di Polda melalui *assessment center*.

Ketiga, Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar lebih tegas dan cepat menuntaskan permasalahan hukum yang berkembang dan meresahkan masyarakat misalnya penyalahgunaan narkoba, terorisme *cybercrime* dan lain-lain. Polri telah mencanangkan program prioritas penguatan penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan, yang diimplementasikan melalui penanganan kasus-kasus yang meresahkan dan menjadi perhatian publik yaitu penindakan bandar narkoba lebih tegas, pencegahan terorisme dengan strategi *preventif strike*, kejahatan *cyber* ditanggulangi secara pro aktif dengan patroli *cyber* dan mengoptimalkan satgas khusus untuk menangani kejahatan-kejahatan terhadap kekayaan negara.

Nomor dua, penjelasan mengenai hasil evaluasi Polri dalam hal:

- a) Pengamanan selama hari raya natal dan tahun baru 2020. Polri menggelar operasi lilin selama 10 hari dengan melibatkan 191.807

personil gabungan Polri, TNI, Kementerian terkait dan unsur masyarakat lainnya, serta menyiapkan 1.792 pos pam, 745 pos pelayanan dan 45 pos terpadu. Selama perayaan natal tidak terjadi aksi terorisme atau pun kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat. Semua ini kita antisipasi melalui operasi cipta kondisi. *Alhamdulillah* aksi *sweeping ormas* juga tidak terjadi selama operasi lilin 2019.

Kemudian setabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan juga dapat terpelihara dengan baik. Kecelakaan angkutan air dan udara juga tidak terjadi. Polri bersinergi dengan instansi terkait lainnya melakukan operasi kemanusiaan, penanggulangan penanganan banjir yang terjadi pada tanggal 1 Januari di wilayah Jabodetabek dan Banten serta beberapa kota besar lainnya.

- b) Penegakan hukum sepanjang tahun 2019 target dan strategi yang akan dilakukan Polri di tahun 2020 serta penanganan perkara yang menjadi prioritas di tahun 2020.

Kami laporkan kepada Bapak dan Ibu yang mulia sepanjang tahun 2019 jumlah tindak pidana yang ditangani oleh Polri sebanyak 249.219 kasus dengan 175.495 kasus sudah diselesaikan. *Crime clearance*nya 70% dibanding tahun 2018 secara keseluruhan jumlah kasus mengalami penurunan 9,7% dan penyelesaian kasus mengalami peningkatan 3%.

Target penegakan hukum di tahun 2020 indikator presentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana umum kami patok 61%, tindak pidana khusus 68%, tindak pidana korupsi 69%, tindak pidana tertentu 62%, tindak pidana *cyber* 65% dan tindak pidana narkoba 85%.

Penanganan kejahatan yang menjadi prioritas Polri yaitu kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat konflik sosial, *illegal mining*, *illegal fishing*, kejahatan migas, kejahatan ekonomi, kejahatan korupsi, karhutla, tindak pidana dalam pilkada, kejahatan transnasional, kasus PT TPPI dan kejahatan investasi serta perbankan,

3. Masalah keamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan negara Indonesia.

a) Posisi dan peran Polri pada Bakamla dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Dalam menjaga wilayah perairan Indonesia Polri melalui satuan Pol Air melaksanakan setrategi preventif, kerjasama dan Gakum. Sehubungan dengan hal tersebut Polri menjalin hubungan harmonis dengan penegak hukum lain di perairan Indonesia salah satunya dengan dengan Bakamla. Peran Polri di Bakamla yaitu mengirimkan personel BKO sebagai komandan kapal dan KKM di kapal Bakamla, lalu menerima pelimpahan kasus Bakamla dan terlibat dalam kegiatan patroli terkoordinasi.

b) Kemudian pelaksanaan kerjasama penyidik dengan PPNS Kementerian Kelautan juga berjalan dengan baik sesuai dengan nota kesepahaman Polri dan KKP yang kami tanda tangani pada tanggal 30 Juli 2019 ketika kami masih menjadi Kabareskrim,

- c) Kemudian patroli pengamanan yang dilakukan selama ini juga secara rutin kita lakukan, namun kami memang hanya berada pada batas wilayah 12 mil laut. Sepanjang periode 2017 sampai 2019 Polri telah mengungkap kasus di wilayah perairan sebanyak 5.939 kasus, dengan 663 tersangka, serta mengamankan barang bukti senilai 568,6 miliar. Beberapa kasus yang menjadi perhatian publik antara lain Polda Sulawesi Tenggara mengungkap kapal membawa 10 ton amunium nitrat, penanganan 645 boks kepiting bertelur di Jakarta yang akan di ekspor ke Taiwan, serta pengungkapan penyeludupan 197 ekor penyu oleh Polda Kepri.
4. Pertanyaan nomor empat, Sinergitas penegakan hukum terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara Polri dengan penegakan hukum lainnya.
Sinergi antara aparat penegak hukum dan pemberantasan tipikor dalam rangka *Integrated Criminal Justice System* dilakukan secara profesional sesuai dengan bidang tugas masing-masing meliputi kegiatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk meningkatkan sinergi kerja sama dan koordinasi antara Polri, Kejaksaan dan KPK pada tanggal 29 Maret 2017 telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang kerja sama dalam pemberantasan korupsi.
5. Pengungkapan kasus-kasus aktual yang menjadi isu nasional dan menarik perhatian masyarakat:
- a) Pengungkapan kasus MeMiles Polda Jatim telah berhasil mengungkap kasus investasi ilegal PT Kam and Kam yang menerapkan sistem piramida menggunakan aplikasi MeMiles dengan menahan dan menangkap lima tersangka. Kapolda Jatim kami hadirkan barang kali nanti akan berkembang diskusi dan tanya jawab tentang kasus ini.
- b) Pengungkapan kasus Novel Baswedan tim gabungan Polri juga telah berhasil mengungkap kasus penyerangan Kapolri kepada saudara novel baswedan dengan menangkap dan menahan dua tersangka yaitu Rahmat Kadir dan Ronny Bugis dan saat ini Polda Metro bersama Bareskrim telah mengajukan berkasnya tahap satu di JPU.
- c) Pengusuran Tamansari di Kota Bandung tadinya kami juga akan hadirkan Bapak Kapolda Jabar, namun kami sudah mendengar bahwa masalah Tamansari ini sudah selesai oleh tim Komisi III yang berangkat ke sana.
- d) Perkembangan penanganan kasus kondensat. Bareskrim telah mengungkap kasus korupsi berupa pengambilan dan pengolahan kondensat bagian negara, yang dilakukan oleh tersangka Honggo Wendratno, Raden Priyono dan Joko Harsono. Perkembangan penanganan kasusnya juga sudah berjalan kemudian tahap dua belum terlaksana karena JPU meminta agar tiga orang tersangka diserahkan bersamaan. Sedangkan tersangka Honggo masih belum diketahui keberadaannya. Penyidik telah melakukan upaya pencarian dengan

menerbitkan DPO, *red notice*, pengumuman di koran dan berkordinasi dengan Kemenlu, NCB serta Atase Kepolisian di luar negeri. Rencana tindak lanjut yaitu berkordinasi dengan JPU untuk proses peradilan *in absentia* terhadap terangka Honggo Wendratno serta melakukan tahap dua untuk tersangka Raden Priyono dan Joko Harsono.

- e) Peredaran narkoba, jumlah pengungkapan kasus narkoba yang ditangani Polri sejak tahun 2015 sampai 2019 sebanyak 223.525 kasus dengan tersangka 282.860. Selama tahun 2019 Polri telah berhasil mengungkap 39.794 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 51.196, 131 diantaranya adalah WNA.
Pengungkapan kasus narkoba dalam periode dua bulan terakhir juga cukup menonjol ada yang 150 kg jaringan internasional Negeri Indonesia. Kemudian beberapa kejadian yang penangkapannya diatas 30 sampai 40 kg baik di Polda Metro, Polda Riau, Polda Sumut dan Polda Jawa Timur, juga sementara ini belum diekspose karena sedang dilaksanakan pengembangan.
Perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang juga berhasil diungkap sepanjang periode tahun 2015 sampai 2019 sebanyak 540 kasus dengan 743 tersangka. Modus operandi terbanyak adalah sebagai TKI 41 kasus, disusul dengan pekerja sex komersial 30 kasus dan asisten rumah tangga 2 kasus.
 - f) Tindak pidana korupsi juga telah dilakukan sepanjang tahun 2019 Polri berhasil mengungkap 1.503 kasus dengan penyelesaian 1.678 perkara artinya ini perkara yang di tahun 2018 diselesaikan di tahun 2019 total kerugian negara sebesar 1,8 triliun serta berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp474 miliar.
 - g) Tindak pidana teroris sepanjang periode tahun 2019 telah terjadi 9 (sembilan) aksi terorisme, jumlah tersebut menurun 52,6% bila dibandingkan tahun 2018. Selain itu selama tahun 2019 Polri telah menangkap dan melakukan proses penyidikan terhadap 297 pelaku dengan perincian tiga orang telah di vonis, 81 orang dalam proses persidangan, 202 dalam proses penyidikan serta 11 orang meninggal dunia. Beberapa aksi teror yang menjadi perhatian publik antara lain ini kami pernah jelaskan waktu Pak Menko Polhukam Pak Wiranto yang terjadi 10 Oktober 2019 serta tanggal 13 November di Polrestabes Medan.
 - h) Kasus-kasus aktual lainnya yang ditangani Polri saat ini adalah pengungkapan kasus penyebaran kebencian terkait Natal di Dharmasraya Sumbar, ini juga sedang berjalan makanya kami menghadirkan Bapak Kapolda Sumbar.
Kemudian pengungkapan kasus terkait Kerajaan Keraton Agung Sejagat di Purworejo Jateng
6. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi Kepolisian. Berbagai dinamika pada tataran global dan regional pada

setiap aspek kehidupan baik ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi dan keamanan akan berdampak pada dinamika keamanan di tataran nasional.

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan tugas dibidang pemeliharaan Kamtibmas masih terdapat potensi aksi kekerasan dan terorisme, berkembangnya radikalisme, gangguan kelompok kriminal bersenjata, potensi terjadinya konflik sosial dan horizontal serta penolakan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Tantangan dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional dan keadilan itu belum optimalnya penanganan kasus yang menjadi perhatian publik. Tantangan Polri dalam pelaksanaan tugas memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang paling utama adalah terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kepercayaan merupakan intisari hubungan Kepolisian dengan masyarakat untuk dapat bertahan dan eksis dalam perubahan yang penuh ketidak pastian dimasa mendatang.

Pimpinan Komisi III serta Anggota Dewan yang saya hormati,

Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan, atas beberapa pertanyaan yang telah diajukan semoga dapat dijadikan pertimbangan bagi Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat dalam memberikan saran dan masukan serta petunjuk guna meningkatkan kinerja Polri dalam memelihara keamanan dalam negeri. Sekali lagi kami tentu mengharapkan masukan dari Bapak-bapak Dewan yang terhormat sehingga kami bisa lebih fokus lagi menatap dan bekerja untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.

Wabilahi taufik hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Om santi santi om.

KETUA RAPAT:

Baik kita sudah mendengar paparan dan penjelasan dari Saudara Kapolri selanjutnya kita masuk pada sesi tanya tanya jawab dan pendalaman, tentunya sebelum kita masuk saya akan menawarkan kepada seluruh Anggota tadi kita sudah sepakat bahwa kita akan menyelesaikan rapat ini jam 13.00 WIB siang kita masih punya waktu dua jam dari sekarang.

Saya menawarkan alternatif pertama adalah setiap Fraksi memberikan satu juru bicara dengan waktu 5 menit saya berikan kita akan bahas perfraksi dulu 5 menit kali 9 (sembilan) Fraksi 45 menit. Setelah itu nanti kalau ada Anggota-Anggota yang ingin mendalami baru kita berikan kesempatan 3 menit setiap Anggota tergantung dari sisa waktu yang ada. Kalau semua setuju kita sepakati disiplin 5 menit. Kenapa 5 menit, supaya bisa ruang lebih lebar untuk setiap Fraksi bisa menyampaikan masukan, pertanyaan dan lain-lain.

Apakah setuju?

(RAPAT : SETUJU)

F.PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E.):

Ketua Aboe Bakar Pak Ketua.

Saya melihat usulan Ketua ini usulan yang paling elegan untuk setiap rapat Komisi Pak Ketua. Jadi saya sarankan sudah tidak usah ditawarkan kembali jadikan semacam ini adalah pola Komisi III, diawali dengan Fraksi kalau 5 atau 6 menit lebih-lebih sedikit juga boleh tetapi baru nanti jangan dirubah-rubah kita sudah datang pagi-pagi semangat tidak dapat pertanyaan. Ini Pak Desmond ini juga suka merubah-rubah ini dia gayanya. Jadi saya pikir gaya yang disampaikan oleh Pak Herman Hery dijadikan kode etik atau SOP Komisi III.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum

KETUA RAPAT:

Baik apa yang disampaikan oleh yang saya hormati Habib, akan kita lakukan. Baik dengan demikian kita setuju apa yang sudah saya sampaikan tadi dan kita akan memulai, namun sebelum saya memulai dari meja Pimpinan Pak Desmond ingin menyampaikan sesuatu saya persilakan.

F.PG (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H.,M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Dari paparan dari pertanyaan jawaban dari pertanyaan banyak hal, dari sekian paparan itu sebenarnya persoalannya persoalan yang hari ini mungkin agak abai kita biicarakan di rapat-rapat kita. Ini bicara tentang wajah Kepolisian sebenarnya. Bagaimana wajah Kepolisian di masyarakat itu kedepan itu lebih lebih mencerminkan *civilian police*. Dalam hal ini peran Binmas bagaimana, peran Sabhara bagaimana dan peran polisi lalu lintas itu bagaimana. Dari paparan Kapolri tadi ini kelihatan peran-peran ini agak kurang. Seandainya peran Binmas, peran Sabhara dan peran Polisi Lalu Lintas ini maksimal maka kejahatan-kejahatan narkoba kejahatan-kejahatan yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal oleh Kepolisian itu tidak muncul.

Nah konsen kami sebagai Pimpinan adalah kedepan hal-hal ini tentunya minimal kita bisa meminimkan persoalan-persoalan yang sebenarnya bisa, misalnya narkoba bagaimana Sabhara, Binmas atau wajah Kepolisian yang lain di tengah masyarakat di tengah kekerasan-kekerasan yang hari ini kelihatan.

Nah tentu hal-hal seperti ini kedepan Pimpinan Komisi III akan *mensupport* ini secara lebih serius agar kita bisa melihat, karena jawaban-jawaban tadi sebanyak kasus-kasus tetapi tumpukan-tumpukan yang terulah bagaimana peran Binmas ini, peran Sabhara ini bisa kedepan maksimal. Ini bukan pertanyaan tetapi sebagai catatan dari respon Pak Kapolri dari pertanyaan yang tadi disampaikan apa yang disampaikan oleh Sekretariat.

Terima kasih Pimpinan

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya Pak Sahroni saya persilakan.

F.P-NASDEM (H. AHMAD SAHRONI, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Kapolri dan jajarannya yang saya hormati; dan
Para Anggota Komisi III,

Kalau saya juga tidak akan bertanya cuma ingin menyampaikan hal terkait Pam Obsus untuk pengamanan Parlemen yang sudah ada MoU tetapi belum dijalankan, takut Pak Kapolri dan jajaran lupa saya akan kasih suratnya sekarang ini untuk ditindaklanjuti dalam batas pengamanan DPR RI.

Terkait masukan dari saya, kalau bisa pengamanannya langsung dibawah Brimob agar terkendali dalam proses pengamanan di Parlemen. Pam Obsus Bib bukan Pam Obvit ini pengamanan Parlemen. Mungkin itu Pak Ketua saya mau kasih dokumennya Pak Kapolri.

KETUA RAPAT:

Silakan. Baik

Teman-teman sekalian,
Anggota Komisi III yang saya hormati,

Dengan tadi dua orang Wakil Ketua bicara dari meja Pimpinan sebetulnya sedikit saya minta 5 menit untuk saya sampaikan. Sudah tergambar bahwa hubungan kemitraan antara Komisi III dengan Kepolisian Republik Indonesia kita membangun sebuah hubungan yang profesional. Terkait apa-apa yang disampaikan di dalam ruang rapat ini hal-hal substansi yang menyangkut kebijakan-kebijakan lembaga. Kita tidak lagi membiasakan diri untuk membawa persoalan-persoalan pribadi, kasus-kasus pribadi di dalam ruang rapat ini sehingga rapat menjadi efektif.

Satu hal sebagai Ketua Komisi saya terus mendorong agar hubungan kita hubungan kemitraan yang profesional itu dilandaskan dengan azas kekeluargaan, karena semua ini kita berkawan sudah lama kemudian bukan berarti karena azasnya kekeluargaan terus kita mengentengkan segala sesuatu. Saya terus terang sedikit terkesan dengan beberapa kali bertemu dengan Saudara Kapolri Pak Idham Azis.

Saya melihat pribadi Pak Idham Azis adalah pribadi yang sederhana dan *commit* walaupun saya tahu beliau cukup keras kalau ditekan akan keras, tegas. Hal yang saya apresiasi dari prinsip beliau adalah beliau mengatakan secara terbuka satu "saya tidak menerima tamu kalau sudah menyangkut

urusan-urusan pribadi, pangkat, jabatan saya tidak terima tamu”. Saya awalnya antara percaya atau tidak percaya tapi saya sudah melihat sudah 90 hari sekian masih konsisten. “Saya tidak menerima swasta pihak ke tiga rekanan atau apa pun saya tidak kenal”, saya perhatikan itu, artinya beliau dengan dalam masa jabatan yang cuma satu tahun lebih sedikit ingin meletakkan dasar profesional sebagai seorang Kapolri.

Kemudian secara terbuka beliau juga katakan “semua bintang tiga punya kesempatan untuk menjadi pengganti saya”, dan memberikan ruang kepada junior adik-adiknya. Nah hal ini saya menilai sebagai orang lama di Komisi III Kapolri telah meletakkan dasar moral yang baik sebagai seorang pemimpin, yang mana tidak membangun klik di dalam.

Beliau memberikan ruang dan kesempatan kepada semua orang terkait dengan apa yang tadi di pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh Komisi III promosi, mutasi, jabatan. Saya percaya bahwa Kapolri akan dengan pertimbangan yang arif dan bijaksana tahu yang namanya *reward and punishment* memberikan kesempatan kepada semua orang.

Dengan apa yang saya sampaikan ini kiranya kita semua di Komisi III ini makin lama akhirnya membangun sebuah hubungan profesional dan kekeluargaan karena kita percaya mitra kita punya tujuan punya niat baik, karena mitra punya tujuan punya niat baik untuk membangun Institusi tentunya kita di Komisi III ini akan juga mendukung Institusi Polri sampai selesai masa jabatan kita. Demikian dari saya. Oleh sebab itu saya mulai kepada Fraksi yang paling besar Fraksi PDI-Perjuangan. Silakan juru bicaranya bicara 5 menit.

Silakan.

F.PDI-P (ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan Komisi III yang saya hormati,
Pak Kapolri beserta jajaran pejabat utama dan para Kapolda yang saya hormati,

Pertama-tama Pak Kapolri saya ucapkan selamat ulang tahun Pak semoga Pak Kapolri panjang umur, sehat selalu dan doa terbaik untuk Pak Kapolri, jangan lupa bahagia Pak. Pimpinan mudah-mudahan tidak dihitung ini 5 menitnya.

Saya pertama bertanya terkait dengan MeMiles Pak pertama apresiasi Pak Kapolda Jatim inovasi penegakan hukumnya tahu, berani kemudian juga bisa meyakinkan kita semua bahwa Institusi Kepolisian itu bisa mengantisipasi kemajuan teknologi. Kejahatan berbasis IT bisa ditemukan secara cermat dan tepat. Banyak orang mengatakan MeMiles ini aplikasi IT dengan demikian bukan bisnis perbankan, bukan bisnis investasi, bukan bisnis perdagangan barang dan jasa tapi Polda Jatim bisa meramu dan membuat formula yang meyakinkan kita semua. Polda selalu mengatakan

ini termasuk bagian dari investasi, ini termasuk bagian dari skema piramid, ini termasuk kejahatan kerah putih kenapa begitu. Polda mampu meyakinkan kita ternyata yang dijual memang jualannya jualan slot Pak tetapi Polda bisa meyakinkan kita semua dengan harga slot itu yang membayar 50.000 sampai 50.000.000 slotnya sama Pak. Slot iklannya kalau memang betul-betul mereka member mau beriklan yang di iklan itu memang iklan komersil tetapi acara ulang tahun dijadikan slot iklan, acara keluarga dijadikan slot iklan. Jadi memang jelas yang dikejar itu adalah *reward Pak*.

Nah mudah-mudahan ya saya ingin juga dilakukan pencermatan khusus Pak, karena ditempat kami ini sangat banyak yang MeMiles Pak Kapolda. Saya ingin katakan tolong yakinkan kita bahwa ini memang praktek investasi. Kemudian juga tolong yakinkan juga Pak Kapolda bahwa uang itu bukan uang keuntungan MeMiles merupakan uang kejahatan dalam kedok yang seperti saya katakan tadi perdagangan piramid.

Yang ketiga tolong disampaikan juga Pak Kapolda bahwa ini semata-mata bukan keuntungan penjualan slot iklan bisnisnya tidak semata-mata jual slot akan tetapi lebih mengarah kepada MeMiles. Mohon juga nanti disajikan data-datanya secara lebih akurat lagi Pak itu yang pertama Pak Kapolda saya agak percepat.

Kemudian yang kedua Pak, saya ingin sampaikan Bapak harusantisipasi ada potensi kerugian negara yang begitu besar Pak. Saya minta Bapak periksa rekayasa industri Pak, periksa yang namanya Panca Amara Utama, periksa yang namanya Direksi Bank Mandiri Pak. Kenapa begitu Pak, ini ada sengketa dagang, ini ditempat Bapak ini di Banggai Ammonia Pak, Banggai Ammonia Plan ini rekayasa industri diberikan pekerjaan untuk membangun Banggai Ammonia Plant Pak nilai investasinya 507, karena telat bayar Pak.

Ini rekind ini plat merah Pak, karena telat bayar ternyata *performance* bonnya di *execute* Pak dicairkan oleh perusahaan swasta Pak, namanya PT Panca Amara Utama. Bapak bisa melihat PT Panca Amara Utama itu induknya adalah PT Surya Esa Perkasa. Presiden komisarisnya adalah Garibaldi Thohir Pak. Sedangkan yang satunya lagi rekayasa industri induknya adalah Pupuk Indo Holding Company yang menginduk kepada Pupuk Indonesia Holding itu BUMN punya Pak, Menterinya Pak Erick Thohir. Tidak sampai disitu Pak ternyata diberikan dana talangan, karena setelah diambil rekind ini bisa kolep mempengaruhi Pupuk Holding dilakukan *bragging loans* Pak 812 miliar cair Pak, karena takut panik diminta lagi pupuk untuk *membbackup* caranya apa dilakukan pinjam dana talangan Mandiri lagi Pak yang main Pak. Untungnya Presiden Komisaris Pupuk Holding berkeberatan. Kami meminta ini diperiksa Pak, karena potensi kerugian negaranya ada US\$ 2 juta Pak.

Berikutnya juga mengenai potensi *claim* perusahaan asuransi plat merah bukan Jiwasraya lagi Pak ini Bumi Putra. Kebetulan di regional empat tempatnya Pak Kapolda Jabar. Potensi *claim* per hari ini 9,6 triliun Pak tetapi konyolnya Pak ini akan kejadian lagi Pak, tidak ada yang gagal bayar katanya

Pak. Bumi Putra hanya punya rencana semua akan dibayar tapi sistemnya harus antri, karena masih kesulitan likuiditas. Ini kan sama saja gagal bayar Pak.

KETUA RAPAT:

Waktu tinggal 1 menit.

F.PDI-P (ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H.):

Ini untuk kilang TPPI Pak, untuk TPPI saya ingin sampaikan Pak ada perbedaan data antara Pak Kapolri sampaikan dengan Pak Jaksa Agung. Pak Jaksa Agung mengatakan semuanya sudah oke, tapi kesulitannya ada di pihak-pihak Kepolisian. Jaksa Agunglah yang menginisiasi akan dilakukan *splitsing* dua orang plus satu itu. Kami mohon yang mana informasi yang benar informasi Kepolisian atau informasi Kejaksaan.

Kemudian yang kedua Pak, Bapak ini kan orangnya canggih sekali Pak masa mencari Honggo itu tidak bisa Pak. Saya ingin kalau perlu, saya mau ikut Pak di Singapura ada namanya Honggo, mudah-mudahan kita bisa bantu tempatnya dimana Pak, Pak Honggo itu Pak. Berikutnya Pak, ini masalah Garuda Pak. Dirut Garuda ini kemana Pak ujung-ujungnya sepi lagi Pak, kita kaya nonton sinetron Pak bagaimana penyeludupan Harley dan sepeda, bagaimana indikasi pelecehan seksual yang semua pramugarinya sudah mengaku disini Pak.

Bagaimana juga mengenai masalah Komisaris yang menduduki di beberapa anak-anak dan cucu perusahaan yang melakukan pengendalian secara langsung Pak, ini bisa kelihatan dari neracanya. Utamanya Pak, bagaimana penyajian laporan keuangan yang tidak benar yang melanggar tidak hanya *trust public* Pak tetapi ini juga pidana dibidang pasar modal Pak.

Kemudian masalah JP Pak Kapolda Jatim ini kaitannya dengan PT BKMS anak perusahaannya Aneka Kimia Raya, kebetulan Fraksi kami yang mengawal Pak. Hampir 600 hektar tanah rakyat yang belum dibayar Pak, alasannya semua berlindung di proyek strategis nasional, kalau kita melakukan pembelaan ada PSN disitu. Rakyat tidak pernah menerima uang tapi tanahnya sudah dirampas, dirampok, tanahnya juga sudah dimanfaatkan oleh pihak JP Pak. Saya katakan di sini sudah perkaranya sampai ke Mabes. Saiful Arif orang dekatnya Bupati Gresik Pak, ini tolong diperiksa Pak masa Polisi dimaki-maki sama Pak Saiful Arif di Kepolisian Pak. Ada dibelakangnya saya tahu ini Pak siapa Pak.

Kemudian juga Pak masalah yang kedua Pak ada yang namanya Justin. Justin itu dijadikan ya semacam kambing hitamlah. Ini kita tahu betul perkaranya seperti apa sudah dua tahun kami menunggu Pak, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan.

Untuk Polda Metro ini kasus siwisidi ini seperti apa. Pramugari yang katanya cantik itu Pak, janganlah dipertontonkan dilakukan festivalisasi

penegakan hukum. Kalau memang dia ternyata simpenan atau gundik buktikan Pak tetapi kalau bukan juga iya tetapi kan gampang orang tuanya siapa, kerjanya dimana dia, gajinya berapa, punya asetnya seperti apa kan kelihatan dapat uang darimana, apakah dari pacar Pak kalau kita punya pacar tidak ngasih seperti itu juga Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Aretria cukup waktunya habis.

F.PDI-P (ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H.):

Ada dua lagi Ketua.

KETUA RAPAT:

Cukup nanti diputaran kedua.

F.PDI-P (ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H.):

Terima kasih Pak Kapolri.

KETUA RAPAT:

Berikut Fraksi Partai Golkar saya persilakan.

F.PG (SUPRIANSAH, S.H., M.H.):

*Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang saya hormati Pimpinan,
Anggota Komisi III yang saya hormati,
Bapak Kapolri beserta Pak Wakapolri,
Dengan seluruh jajaran yang saya hormati,

Sejenak tadi kita sudah mendengarkan secara rinci jawaban-jawaban dari Pak Kapolri dan sangat jelas dan terang sekali jawaban-jawaban itu dan saya memberikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian yang sudah memberikan jawaban yang begitu bagus pada kesempatan ini, namun dari diantara seluruh jawaban-jawaban tadi itu yang ada saya memfokuskan pada yang belum dibahas tentang peristiwa yang sangat besar yang baru-baru terjadi ini di wilayah Tanjung Priok sana ditemukannya limbah sampah yang di import dari luar.

Nah kita melihat bahwa Indonesia yang begitu indah ini jika setiap kesempatan bangsa lain mengirim dan mengimpor di sini sampah-sampahnya saya tidak yakin pada suatu hari nanti Indonesia ini akan tertular berbagai macam penyakit. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada Bapak Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk melakukan penangkapan

menindak tegas karena tidak mungkin barang bergerak sampai Tanjung Priok atau di pelabuhan-pelabuhan mana pun tanpa ada yang memesan, tanpa ada yang mengirim. Dua titik ini pengirim dan penerima ini mesti memang harus dicari seluruh yang terlibat didalamnya. Katakanlah pada 87 kontainer sampah plastik ilegal masuk ke Indonesia itu ada 24 kontainer sudah ada di kawasan berikat oleh PT Advance Rosalita atau ART di Cikupa Tangerang, sedang 63 kontainer masih di Pelabuhan Tanjung Priok.

Pada tanggal 29 kemarin Agustus Bea Cukai dengan Bea Cukai di Tangerang telah berkordinasi bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan telah melakukan pembicaraan tentang penindakan pertama PT Harvesitindo dengan internasional HI yang mengimpor 102 kontainer plastik dan PT ART mengimpor 24 kontainer berisi biji plastik. Kemudian PT NHI yang mengimpor 138 kontainer berisi chips biji plastik, PET dan *staple fibre*. Nah ini semua ini menurut hemat saya bahwa ini adalah penyakit, ini adalah sampah yang telah dikirim ke Indonesia mungkin tidak berlebihan kalau Polisi Republik Indonesia melakukan penindakan terhadap orang-orang bukan hanya direktornya saja tetapi ada orang-orang dibelakangnya itu yang saya yakin sekali Pak Kapolri yang menikmati hasilnya selama ini mulai pada tahun 2015 ini sudah jalan dengan masif ini, tapi baru terbongkar kali ini setelah teman-teman Anggota DPR RI turun kesana. Ini tidak bisa dibiarkan dan harus benar-benar digali sampai ke akar-akarnya.

Yang kedua harapan kami adalah hubungan dengan dari beberapa negara yang telah terindikasi telah mengirim yaitu Amerika 353.950 ton, kemudian Marshall 193.7000 ton, kemudian Meksiko 118.000 ton, kemudian Australia 102.000 ton, kemudian Venezuela 76.000 ton, Singapura 59.000 ton, Jerman 56.000 ton, Belanda 33.000 ton. Inilah negara-negara yang akan menghancurkan Republik ini Pak Kapolri.

Kalau perlu melakukan hubungan kembangkan ini supaya Pak Kapolri bersama dengan institusi Pemerintahan Republik ini melakukan hubungan dengan ke luar negara sana supaya jangan lagi melawan tindakan-tindakan seperti ini dan benar-benar yang meminta dan mengimpor seluruh barang-barang limbah plastik ini hukum seberat-beratnya kalau perlu hukum mati, karena ini mengancam jiwa kita semua sebagai rakyat Indonesia. Saya kira itu Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Tepat 5 menit.

Fraksi Partai Gerindra kami persilakan.

F.PG (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Terima kasih.
Yang terhormat Pimpinan Komisi III DPR RI,
Rekan-Rekan Anggota Komisi III,
Pak Kapolri beserta jajaran,

Saya pertama soal MeMiles Pak, MeMiles saya melihat apa yang dilakukan Polda Jatim secara garis besar sudah cukup bagus cuma ada ganjalan ini bukan persoalan personal tetapi menurut saya juga penting terkait pernyataan akan adanya pemanggilan kepada rekan saya Mulan Jameela. Saya ikuti betul, saya cek betul, apa kaitannya orang yang *perform* yang hanya bernyanyi begitu kan kontrak ada, hak ada, kewajiban ada dengan tindak pidana investasi bodong ini. Kalau dia *member* atau dia *top up* oke, karena pemanggilan seseorang itu sebetulnya tidak hanya nuansa hukumnya saja Pak Kapolri ada nuansa sosial, ada *cost* sosial bagi orang-orang ya kan, yang dipanggil. Namanya diberitakan kemudian pemberitaannya digoreng macam-macam. Mulan Jameela terjerat MeMiles dan lain sebagainya padahal orang cuma bernyanyi begitu kan.

Jadi menurut saya lebih hati-hatilah dalam melakukan penyidikan. Oke secara dalam konteks hukum mungkin lebih banyak saksi tetapi kalau tidak relevan buat apa juga membuang-buang tenaga. Memang ada pemberitaan tetapi tolong juga dipertimbangkan kepentingan-kepentingan orang. Kalau kami ini Pak Kapolri diberitakan sedikit saja itu pasti akan berpengaruh di dapil Pak. Orang di dapil ya kan misalnya saya ini 76.000 orang memilih saya begitu ada berita soal Habiburokman 76.000 orang itu akan memperbincangkan, akan berpengaruh. Oke, pada akhirnya tidak akan kemana-mana, betul kami percaya, kami percaya Polda Jatim profesional tidak akan kemana-mana tetapi akibat negatif pemberitaan itu kami minta tolong juga diperhitungkan Pak itu satu.

Yang kedua Pak Kapolri saya hari-hari juga banyak mendapat keluhan Pak soal kesempatan saudara-saudara kita perwira menengah untuk ikut dalam pendidikan sekolah ...(suara tidak jelas) misalnya Pak. Kalau menurut saya Pak memang tidak diobral tetapi dilonggarkan sedikit ada baiknya. Kenapa, kalau perwira menengah Bapak sudah ikut berarti kan ada peningkatan kinerja dalam beberapa tahun. Orang yang punya harapan dengan orang yang *hopeless* itu beda Pak. Orang yang punya harapan wah saya siapa tahu kalau kerja rajin pasti ada rezeki kedudukan, rezeki pangkat dan lain-lain sebagainya. Kalau itu Bapak longgarkan sedikit saya pikir mungkin dalam konteks kuota oke ada *cost* pengeluaran tetapi dalam konteks manfaat *benefit* bagi Polri pasti besar sekali, karena orang-orang ini pasti akan bekerja kinerjanya meningkat begitu Pak.

Terakhir Pak Kapolri saya melihat adanya kebutuhan juga Pak Polri menginisiasi sekolah khusus sekolah unggulan ya untuk setaraf SMA seperti Taruna Nusantara yang dulu digagas bos saya Pak Prabowo mungkin sekarang Polri juga mampu ya di lingkungan Polri dibikin sekolah seperti itu Pak, karena apa, karena kita melihat generasi muda kita ya Pak kita saat ini

ada banyak tantangan budaya Pak. Kita ingin anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan itu mungkin Polri ada kemampuan disitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik yang berikut Fraksi Partai Nasdem, kami persilakan.

F.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang sekalian.

Para Anggota Komisi dan Pimpinan yang saya hormati,
Pak Kapolri beserta seluruh jajaran,

Ada dua poin yang akan saya sampaikan yang pertama terkait dengan penjelasan Pak Kapolri mengenai pengamanan Natal dan Tahun Baru kemarin. Saya dalam reses pertama kali di Desember kemarin secara khusus melakukan pemantauan terhadap pengamanan Natal dan Tahun Baru di Provinsi Lampung. Saya didampingi juga oleh Pak Kapolda Pak Irjen Purwadi Ariyanto, kemudian saya secara khusus datang ke berbagai pelosok bersama para Kapolres mengunjungi juga yanmas-yanmas pengamanan Natal dan Tahun Baru. Saya melihat rapi sekali koordinasi antara Polri dengan instansi-instansi terkait Pemda, SAR, Babinsa, Kodimnya dan sebagainya termasuk sampai juga dengan pramuka. Karena ini saya berikan apresiasi terhadap apa yang telah dilaksanakan oleh Polri ini yang membuat Natal dan Tahun Baru di Lampung aman begitu juga di nasional. Tolong dilanjutkan Pak kerja baik ini.

Yang kedua terkait dengan kasus penyiksaan. Beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengar adanya pengakuan dari salah seorang terdakwa dalam kasus demonstrasi yang lalu di pengadilan yaitu atas nama Lutfi, yang bersangkutan mengaku mengalami penyiksaan ketika dalam proses pemeriksaan. Pak Kapolri dan seluruh jajaran Polres kalian kita sudah meratifikasi konvensi *convention against torture and other cruel, inhuman or degrading punishment or treatment* melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 artinya ada kewajiban bagi negara untuk menjamin tidak ada lagi praktek penyiksaan dan kemudian jika pun terjadi maka harus ada pengusutan dan ditindaklanjuti secara hukum.

Saya juga mendengar bahwa Kapolri telah membentuk tim propam. Saya mohon apa pun temuannya mohon dibuka secara luas, jika pun ada temuan ada kejadian mohon tanpa ada upaya untuk melindungi oknum misalnya ada itu kita harus tegas Pak karena kita sudah meratifikasi konvensi menentang penyiksaan tersebut.

Nah ternyata juga selain dari kasus Lutfi, ada juga kasus-kasus lainnya yang serupa. Saya mencatat diantaranya terjadi di Yogya atas nama Halimi Fajri dan Fahrizal Akbar korban salah tangkap di Polresta Yogyakarta. Mengalami penyiksaan dalam proses pemeriksaan. Yang bersangkutan juga sudah melapor ke propam Mabes Polri. Selain itu ada juga kasus meninggalnya tahanan di Polres Bantai atas nama Sugiyanto yang mengaku atau berdasarkan keterangan saksi dikatakan dipukuli dalam proses pemeriksaan ketika terjadi pengembangan kasus. Sudah melapor juga ke propam Polda Sulsel. Nah pertanyaannya Pak Kapolri apakah untuk dua kasus lainnya ini juga dapat dibentuk tim secara khusus untuk mengusut adanya pengakuan-pengakuan atau dugaan-dugaan penyiksaan ini, karena menurut saya kasus penyiksaan itu sangat penting. Ketika terjadi penyiksaan yang dilakukan oleh oknum saya yakin ini oknum, karena dari Polri dari Bareskrim itu sudah jelas tidak akan mau ada praktek penyiksaan dalam proses penyidikan, karena keterangan dibawah penyiksaan itu pun juga tidak bisa bernilai dalam proses pembuktian di persidangan.

Oleh karena itu maka untuk mendukung promotor Polri yang profesional, modern dan terpercaya maka tolong berikan perhatian yang serius-seriusnya terhadap kasus penyiksaan ini dan jika ada oknum tindak secara keras. Kita tidak ingin hanya dengan satu dua kasus ini kemudian nama Polri tercoreng. Keinginan kita untuk mewujudkan promotor ini menjadi terhambat. Oleh karena itu khusus mengenai kasus penyiksaan saya juga minta meskipun sudah ada beberapa Perkap (Peraturan Kapolri) yang memberikan penegasan soal perlindungan HAM tetapi di zamannya Pak Idham mohon berikan penegasan lagi bahwa tidak ada satu pun, tidak boleh satu pun Anggota Kepolisian yang melakukan penyiksaan dalam proses pemeriksaan di Kepolisian agar kita pun juga merasa tegas bahwa ini adalah perintah langsung dari Kapolri.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih disiplin waktunya.
Yang berikut Fraksi Partai PKB.

F.PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua Komisi III dan Para Wakil Ketua,
Sahabat-Sahabat semua para Anggota Komisi III,
Pak Kapolri dan seluruh jajaran dari Polri,

Pertama kita tadi lihat paparan beliau bagaimana prestasi-prestasi yang dilakukan, saya mencatat satu Pak dan kita perhatikan bahwa kemarin

di masa Natal Tahun Baru kemudian beberapa *event-event* nasional bahwa yang biasanya *accident* itu selalu ada saja gangguan, ini kita apresiasi penanganan Polri bagaimana deteksi dini terutama tindakan-tindakan terorisme Pak. Ini yang membuat kadang-kadang kan bukan hanya terkait keselamatan jiwa tetapi ini akan membuat perekonomian kita juga *trust* di tataran baik regional maupun internasional ini menjadi menurun Pak.

Nah sekarang ini ada juga bukan justru gangguan terorism tetapi muncul berbagai pemahaman atau keyakinan bahkan membuat satu komunitas, yang ini ya jangan dianggap enteng, ini kan ada korban juga dari sisi penipuannya seperti muncul ya kaya kemarin Bapak sudah tangani mungkin dengan pasukannya di Jawa Barat kaya Sunda Empire atau kerajaan apa itu Sapujagat segala macam. Ini Pak masyarakat yang kecil yang tidak tahu apa-apa dia kan menjadi korban beli baju seragam biar gagah seperti Bapak-bapak kan dapat bintang ada bintang dua, bintang tiga. Ini harus disikapi betul-betul bagaimana terutama penanganan disampaikan ke publik bahwa supaya tidak terjadi lagi kedepan hal-hal seperti ini. Juga bisa dilakukan deteksi dini Pak, itu satu.

Yang kedua terkait perkembangan sekarang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang lagi dilakukan juga pengawasan panja-panja yang oleh DPR yang menyangkut tentang tadi dana masyarakat. Ini tolong diantisipasi bagaimana nanti akses daripada ini kan terjadi kadang ini tidak seragam juga kemarin Menteri BUMN, teman-teman DPR RI kemudian juga komitmen pengembalian dana Jiwasraya, ini kan masyarakat menunggu. Kalau misalkan Polri juga tidak hadir disana ini nanti eskalasi dibawah ketika proses pengembalian dana ini merasa mereka ini terjadi satu deskriminasi oh kok saya belum atau misalkan terjadi gerakan dibawah ini harus betul-betul menjadi perhatian Bapak-bapak seluruh jajaran dari Polri itu.

Kemudian tidak lupa Pak sebentar lagi Pilkada serentak, ini bagaimana penanganan mohon dijelaskan juga nanti kesiapan dari Polri. Kita harapkan semua netralitas Polri di Pilkada serentak tahun 2020 ini, kemudian juga kesiapannya dan kita harapkan apa kesuksesan yang selama ini sudah dicapai oleh seluruh jajaran Polri akan semakin meningkat.

Terima kasih Pak Kapolri. Ketua terima kasih.

Wallahulmuafiq Illa Aqwamthoriq.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Fraksi Partai Demokrat silakan.

F.PD (Ir. H. MULYADI):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Pimpinan,
Pak Kapolri beserta seluruh jajarannya.

Saya melihat Pak Kapolri begitu serius di rapim pun saya membaca bahwa Polri mempersiapkan pengamanan serentak Pilkada tahun 2020 khususnya dalam menjaga stabilitas dan netralitas Polri. Sehubungan dengan hal tersebut kami memberikan apresiasi kepada Polri bahwa apa yang saya tanyakan Pak Kapolri pada waktu *fit and proper test alhamdulillah* itu bisa dilaksanakan dengan baik. Sampai saat ini saya lihat Polri sangat serius Pak untuk, khususnya Pak Kapolri memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Polri agar dalam Pilkada serentak tahun 2020 betul-betul menjaga netralitas, dan juga saya memberikan apresiasi kepada Kapolda Sumatera Barat saya melihat juga bisa bertindak tegas dan profesional sehingga suasana sangat kondusif dan tentu hal ini perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan, karena pesta demokrasi tahun 2020 sebentar lagi akan dilaksanakan dan seperti dulu saya sampaikan bahwa kualitas demokrasi salah satunya ditentukan dengan profesionalnya Polri. Saya beri apresiasi kepada Pak Kapolri beserta jajarannya.

Kemudian dalam rangka menunjang peningkatan kinerja Polri kami mengusulkan agar konsolidasi internal agar dipercepat dilakukan khususnya di Polda-Polda sehingga peningkatan kinerja dapat dipastikan semakin lama semakin baik khususnya di tataran-tataran mulai dari direktur dan polres-polres kebawah, dan saya juga mengusulkan Pak Kapolri pengalaman saya sebaiknya mutasi Polres itu tidak hanya muter-muter di satu provinsi saja Pak, dari Polres ini pindah ke Polres ini. Sebaiknya dia diberi kesempatan ditempat provinsi lain yang kultur dan budayanya berbeda sehingga mereka mempunyai pengalaman yang lebih kaya Pak. Pada suatu saat mereka menjadi pimpinan atau sudah menjadi jenderal banyak hal yang mereka dapat dari daerah-daerah yang berbeda. Jadi kalau hanya muter-muter disuatu provinsi saja, saya rasa satu provinsi saya rasa hampir sama kulturnya tidak memperkaya pengalaman mereka, dan juga terkait dengan *reward and punishment* itu juga perlu konsisten Pak agar seluruh jajaran Polri bagi yang betul-betul ingin bekerja profesional mereka mendapat jaminan bahwa mereka akan mendapat penghargaan dari atasannya.

Sementara mereka yang bekerjanya tidak profesional dan banyak melanggar aturan-aturan tentu mereka juga mendapat *punishment* sehingga mereka takut Pak. Kalau mereka takut kami punya keyakinan mereka akan berorientasi kepada kinerja yang lebih baik, tapi kalau itu tidak dilakukan secara konsisten mereka akan “ah saya melanggar, saya ada kesalahan paling nanti juga dimaafkan, tidak ada terkait dengan jabatan dan lain sebagainya”. Konsekuensinya mereka juga akan tidak merasa ada sesuatu terkait dengan semangat mereka untuk bekerja. Harus ada pembeda antara orang yang bekerja baik dengan yang tidak baik ini sesuatu yang sangat umum disebuah organisasi.

Kemudian tadi disinggung oleh Pak Arteria Dahlan Pak, ini memang sudah menjadi topik rapat kita berkali-kali dengan Jaksa Agung yaitu masalah

Honggo ini Pak. Jaksa Agung mengatakan dari tiga yang tersangka hanya diserahkan oleh Polri dua. Mereka kesulitan mereka mengembalikan, karena apalagi Honggo ini saksi kunci. Jangan-jangan kalau Honggo ini tidak bisa diserahkan, yang dua itu bisa bebas Pak. Ini yang resiko sangat tinggi bagi Jaksa Agung. Kemarin juga rapat dengan Jaksa Agung kesulitan mereka adalah seperti itu. Kami mengharapkan Polri dalam waktu yang tidak terlalu lama seperti yang disampaikan oleh Arteria tadi, karena ini korupsi puluhan triliun ya dari kondensat ini, saya rasa harusnya Polri bisa lebih cepat lagi mencari keberadaan Honggo ini tentu melalui jalur interpol Pak.

Sekali lagi juga masalah narkoba Pak, saya tidak bosan-bosannya Pak, saya setiap rapat hampir selalu menyampaikan masalah narkoba ini, karena saya melihat sendiri Pak bagaimana dampak dan bagaimana saya membayangkan generasi muda kita di kampung-kampung itu Pak sudah terjangkit dengan pemakai-pemakai narkoba ini. Maka dari itu kami meminta laporan khusus Pak kalau bisa saya atas nama Fraksi Partai Demokrat meminta laporan khusus menginventarisasi secara detail Pak potensi masuknya narkoba ini dari luar darimana Pak pintu-pintunya. Kalau memang tidak bisa oleh Polri sendiri ditangani itu harus dilakukan kerja sama misalnya dengan TNI. Apalagi Pak Kapolri dengan TNI kan sekarang sejak zaman Pak Tito kan sangat bagus sekali hubungannya

KETUA RAPAT:

Saya ingatkan waktunya.

F.PD (Ir. H. MULYADI):

Waktu tinggal sedikit.

Kemudian juga Polri juga kita harapkan masuk ke kasus-kasus yang *high level Pak*. *High level* itu maksudnya di sektor tambang dan migas Pak karena KPK sendiri mengatakan itu masuk kategori *high level*. Kami pun sangat *sophisticated* dan sangat sulit Pak kadang-kadang mereka melakukan pembuktian. Sebagai contoh Pak waktu saya menjadi Pimpinan Komisi VII hitungan ekspor volume batu bara antara Menteri Keuangan dengan ESDM saja itu selalu berbeda Pak dan berapa triliun itu perbedaan penerimaan negara dari sektor tambang ini Pak. Jadi mohon kiranya ini juga menjadi perhatian Polri karena ini potensi kerugian negara yang tidak sedikit yang memang memerlukan pendalaman yang lebih cermat lagi karena memang modus dan polanya sangat canggih dan juga.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Mulyadi cukup waktunya habis.

F.PD (Ir. H. MULYADI):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Yang berikut Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

F.PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pak Ketua yang saya hormati dan jajaran,
Institusi Polri, Kapolri dan jajarannya.

Insya Allah pertemuan pagi ini mendapat berkah dari Allah *Subhanahu Wa ta'ala*. Perkenankan saya pagi ini memberikan apresiasi kepada Kapolri yang membuat suasana Rapim Polri kemarin sangat sejuk sekali. Saya pikir ini menghadirkan tausyiah dari seorang ustad dalam menggelar rapim ini fenomena. Ini adalah terobosan, saya pikir perlu ditiru oleh Kapolri-kapolri yang akan datang. Ini adalah implementasi dari Pancasila Pak sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi cara Bapak ini *insya Allah* cara yang diberkahi Allah dalam kerja kita di NKRI ini Pak. Selain itu saya juga memberi apresiasi kepada Kapolri yang meminta agar para aparat di lapangan. Saya ulangi aparat di lapangan mengedepankan pendekatan humanisme saat menangani unjuk rasa. Saya pikir ini tolong Askop, orang-orang yang di lapangan ingat perintah Kapolri salah SOP-nya dimainkan Pak seperti Bapak pasal-pasal yang dibunyikan dalam rapim kemarin. "Manis asam rasa stroberi Pak jangan diadu dengan rasa manggis, ingat-ingat pesan Kapolri hadapi demonstrasi dengan humanis".

Saya mulai dari persoalan SDM Pak Kapolri Komponas menyampaikan selama tahun 2019 menerima 2059 pengaduan yang kebanyakan berkaitan dengan pelaksanaan tugas jenderal yang tidak profesional. Ini menandakan masih banyaknya persoalan penyalahgunaan kewenangan oleh personil. Ini penting perhatian, misalkan saja dua kasus yang lagi menjadi atensi publik pada pekan-pekan terakhir. Satu ada Brigadir HH yang bertugas sebagai Banit Opsnal Surveillance diintelijen Densus 88 Antiteror Polri yang menjual senpi ke sipil. Saya pikir ini tidak menarik ini, Glock 17 yang dijual, bagaimana ini bisa terjadi Pak, Antiteror. Apalagi berita Polri pesta narkoba di asrama Polri Pak, di asrama Polisi, bagaimana bisa tiga Polisi ada dua warga sipil menggelar pesta sabu di asrama Polisi Tantui Ambon. Ada apa sebenarnya dengan SDM kita ini Pak, saya pikir ini intropeksilah sifatnya ya tidak mencampuri tidak apa ini buat perlu kita perhatikan bersama apakah pemberian mentalnya masih kurang Pak atau pengawasannya kurang atau bagaimana. Saya pikir ini mari kita intropeksi bersama.

Satu lagi contoh soal SDM pada persidangan di PN Jakarta Pusat 20 Januari Pak kemarin Lutfi Alfiandi. Saya sudah berusaha untuk menjadi penjamin ternyata tidak berhasil, memang tidak mudah. Lutfi Alfiandi pembawa bendera saat demo STM yang fotonya viral Pak, memberikan pengakuan di depan persidangan dan ini fakta persidangan, bersangkutan disetrum untuk mengakui melempari petugas dengan batu. Anak STM Pak

disetrum. Ini pengakuan diberikan di depan persidangan. Tentunya saya pikir ini harus mendapat atensi dari kita Pak, masa kalau anak STM disetrum bagaimana ceritanya. Kenapa bisa terjadi seperti ini saya pikir tolong diberi penjelasan khusus, dan ini sudah mulai kena teguran tidak humanis Pak.

Kedua soal narkoba, saya ini keras Pak kalau soal narkoba Pak bunuh saja Pak kalau bisa Pak, tidak ada cerita tidak ada basa basi sama bandar narkoba Pak siapa pun namanya. Apalagi BNN sebagai pencegahan ini berarti ada masalah saya lihat. Saya lihat ini dari grafik laporan Bapak meningkat terus. Negara ini sudah darurat narkoba Jenderal, sampai saat ini masih banyak zona merah di Republik ini saya lihat. Yang harus diatensi oleh Polri setidaknya ada 654 kawasan catatan saya Pak narkoba diseluruh Indonesia. Apalagi daerah Kalimantan Pak mulai Kaltara, Kalbar perbatasan Entikong sana, Kalsel dapil saya juga Pak. Pak Kapolri perlu perintahkan kepadanya untuk mengurangi *hot spot* narkoba yang sangat banyak itu. Saya tadi itu kontak-kontek dengan Dir Narkoba PMJ hari ini pagi ada penemuan tapi data belum saya dapat. Tolong kasih saya data biar saya bunyikan buat Anda, ternyata belum sampai.

Pak saya hormat sama PMJ Pak dan sudah banyak dilakukan dengan kekerasan soal narkoba ini, dan saya pikir wajah Pak Kapolri untuk menghantam narkoba cocok Pak, berkelas untuk menimpa secara keras, karena ini generasi kita hancur Pak bukan main-main. Kalau narkoba ini lipatan kedepan maka saya berharap nanti BNN pun harus mendapat perhatian sesama Polri *insya Allah*. Misalkan saja di Jakarta ada 117 zona merah tolong kasih target pada Kapolda agar jumlah zona itu bisa dikurangi Pak secara berkala. Tentunya perlu dievaluasi, saya tadi saya katakan bersama BNN sehingga nantinya akan terlihat ada berapa sebenarnya pengurangan zona merah narkoba tersebut. Ini saya atensi sekali Pak, saya dukung Pak Ketua Komisi III mari kita dukung untuk menghantam narkoba dengan keras dan tembak dengan hukuman mati tidak ada cerita itu sesuai dengan undang-undang.

Yang terakhir mungkin Pak bukan yang terakhirlah masih lanjut. Soal

KETUA RAPAT:

Saya ingatkan waktu sudah habis.

F.PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E.):

Sebentar sedikit.

Jenis kejahatan di dunia maya ini cukup marak Pak saya ber ini perlu perhatian. Bayangkan saja di Papua sepanjang 250 ada 1.180 pengaduan pidana *cyber* Papua Pak, artinya apa berarti cukup tinggi masalah *cyber* ini. Di Polda Metro data 2.300 laporan pada tahun 2019. Ini saya pikir salah satu indikator tingginya perkara *cyber*. Ini mungkin berhubungan dengan pendanaan Pak. Saya berharap Asrena nanti bisa berpikir keras untuk membantu *cyber* Pak karena memang era di 4.0 maksud saya

KETUA RAPAT:

Habib cukup waktunya habis.

F.PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E.):

Iya terima kasih.

Semoga bisa mendapat perhatian dan masalah Masih diperhatikan Pak jangan sampai minim citra menjelekkan Polri dan penegak hukum di seluruh Indonesia. Terima kasih Ketua. Mohon maaf berlebihan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Fraksi PAN berikut.

F.PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Baik.

Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati, Kapolri beserta seluruh jajarannya yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama dari paparan yang disampaikan Saudara Kapolri saya menghargai. Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan yang memang kalau kita amati itu meletakkan dasar dalam rangka untuk melakukan reformasi kultur di Institusi Kepolisian dalam menciptakan Polisi yang modern dan terpercaya dan profesional. Tapi memang kalau kita melihat perkembangan saat ini Saudara Kapolri bahwa tantangan gangguan Kamtibmas di masa-masa yang akan datang itu semakin kompleks dan mengarah kepada kejahatan-kejahatan transnasional baik itu dalam kaitan masalah kartel, bioterrorism, lalu kemudian narkoterrorism dan *cybercrime*. Perkembangan kejahatan seperti ini memang tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang berpengaruh terhadap kondisi Kamtibmas kita saat ini. Saya kira ada beberapa hal yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya *cybercrime*. Banyak ya negara kita adalah tempat operasionalnya sindikat para penipu-penipu asing dan banyak yang korban.

Nah saya ingin menanyakan sejauh mana Institusi Kepolisian menghadapi kejahatan-kejahatan yang saya sebutkan tadi, karena ini adalah kejahatan yang betul-betul berkembang sangat pesat dengan perkembangan teknologi informasi, dan informasi yang terjadi saat ini, itu yang pertama.

Lalu kemudian yang kedua, tadi juga sudah dikonfirmasi oleh kawan-kawan saya kira memang *Integrated Criminal Justice System* dan manajemen penanganan perkara di Institusi Kepolisian ini memang kita melihat masih perlu dibenahi. Tadi dikonfirmasi dalam kaitan masalah kasus TPPI. Kasus ini ditangani kepolisian sejak tahun 2015 dan menetapkan 3 (tiga) orang tersangka ada siapa tadi disebutkan Honggo, lalu kemudian Raden Priyono dan juga Joko Harsono dengan kerugian negara kurang lebih 35 triliun kondensat.

Rapat dengan Jaksa Agung kemarin memang sepertinya pihak kepolisian ini berkeas bolak-balik dan sebagainya, karena persoalan keberadaan Honggo yang sampai saat ini. Nah sejauh mana penanganan kasus sinergitas antara aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus ini, sehingga tidak ada lagi kesan ingin melepas tangan begitu loh. Rapat dengan Jaksa Agung seakan-akan bahwa bukan mereka yang menjadi masalah tetapi ada di pihak Kepolisian. Dengan tidak ditemukannya Honggo ini ya seperti yang disampaikan tadi bahwa ada kemungkinan dua orang yang sudah ditetapkan tersangka bisa lepas kan begitu dan kerugian negara cukup besar. Ini yang saya katakan bahwa *Integrated Criminal Justice System* ini perlu dibenahi dan juga penanganan-penanganan manajemen perkara di Institusi Kepolisian perlu juga menjadi perhatian.

Yang ketiga Pak Kapolri saya ingin mengkonfirmasi karena ini pertanyaan publik sebenarnya ya yang sudah ramai diberitakan tentang kejadian yang ada di PT IKA. Dari beberapa pemberitaan yang muncul seakan-akan bahwa kejadian itu ada upaya ada kesan, karena ini juga menyangkut masalah Institusi Kepolisian, menghalang-halangi proses atau langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di sana. Apa yang sesungguhnya terjadi begitu loh di PT IKA. Sampai-sampai ada berita bahwa penyidik KPK itu diinterogasi bahkan dilakukan pemeriksaan urin dan sebagainya. Ini pertanyaan publik Pak Kapolri saya konfirmasi dalam ruang rapat Komisi III ini apa yang sesungguhnya terjadi supaya pemberitaan yang simpang siur ini ada penjelasan di masyarakat dalam kaitan menyangkut masalah kasus Harun Masiku yang ada di PT IKA pada saat aparat KPK melakukan langkah-langkah dalam kaitan masalah kasus itu.

Berikutnya dalam kaitan masalah narkoba juga sudah banyak diselesaikan ditanyakan oleh kawan-kawan tadi dan saya meminta supaya betul-betul aparat Kepolisian dalam melakukan penanganan kasus ini. Itu secara pasif anggota yang melakukan tindakan harus diapresiasi bukan justru sebaliknya diproses begitu seperti yang pernah saya sampaikan sama Pak Wakapolri.

Berikutnya dalam kaitan masalah anggota kita dari Brimob. Saya menaruh perhatian terhadap Anggota Brimob ini Pak Kapolri, karena di beberapa kejadian katakanlah misalnya yang ada di Poso Pak Kapolri pernah bertugas disana bagaimana kerasnya adik-adik kita dalam melakukan pengamanan disana dan bahkan banyak jatuh korban. Begitu pula ketika terjadi konflik di beberapa daerah Papua misalnya selalu dikirim, dimana tempat rusuh pasti Anggota Brimob yang dikirim terdepan kan begitu. Saya

berharap Pak Kapolri memberikan perhatian khusus terhadap Anggota-anggota Brimob ini pada saat dia mau sekolah misalnya diberikan kuota khusus, karena saya merasa prihatin melihat mereka tidur di lapangan dan sebagainya pada saat terjadi kerusuhan-kerusuhan bahkan saya di Poso beberapa kali berinteraksi dengan mereka karena kebetulan itu dapil saya. Sungguh sangat prihatin melihat kondisinya. Nah pada saat mereka mau pendidikan diberikanlah kuota buat adik-adik kita ini, begitu pula yang mau Sespim dan sebagainya. Nah itu beberapa hal yang saya sampaikan.

Dalam kaitan menyangkut masalah kasus novel Pak, karena ini kan sudah ditetapkan dua tersangka ini. Pihak Kepolisian sudah menetapkan dua tersangka dalam kaitan masalah kasus Novel, sejauh mana penanganan kasus ini dan apa motifnya dalam kasus Novel ini.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Sebelum saya lanjutkan kepada Fraksi PPP saya tambahkan sedikit Pak Kapolri. Terkait Brimob yang disampaikan oleh Saudara Suding, kami melihat kebutuhan di lapangan jumlah Brimob ini sangat terbatas sehingga Brimob ini di BKO-kan kemana-mana. Kemudian kami juga mendengar bahwa ada rencana penambahan Brimob, sudah sejauh mana prosesnya, dan organisasi Brimob kami mendapat informasi akan dikembangkan menjadi bintang tiga. Nah hal ini saya juga ingin mendapat penjelasan dari Kapolri nanti pada saat waktu penjelasan nanti. Kita teruskan ke Fraksi PPP.

Silakan.

F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Bapak Ibu Komisi III,
Yang terhormat Pak Kapolri dan Pak Wakapolri,
Para pejabat utama, para Kapolda; dan
Seluruh jajaran yang hadir pada rapat hari ini.

Ada dua bagian yang ingin saya sampaikan, yang pertama yang sifatnya apresiatif tentu saja. Saya melihat bahwa Polri ini sebagai lembaga penegak hukum ini sudah *advance* sudah menggagas sesuatu yang bahkan kita para legislator belum menuangkannya di dalam undang-undang. Ini terkait dengan penerapan keadilan *restorative justice*. Kita sama-sama mengetahui bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 Pak Kapolri waktu itu masih Pak Tito telah menerbitkan surat edaran SE/8/VII/2018 yang ini menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri agar mengedepankan prinsip-

prinsip keadilan *restorative* dalam penyelesaian perkara pidana. Sementara kita belum memberikan kecukupan pengaturan dalam undang-undang baik dalam KUHP maupun dalam KUHPA soal ini. Ini tentu sesuatu yang harus kita apresiasi. Apalagi ini juga menjadi bagian dari yang dikomitmenkan oleh Pak Kapolri Jenderal Indham Azis pada saat *fit and proper test* di Komisi III ini tentang penerapan keadilan *restorative* ini.

Nah kami berharap Pak nanti barang kali jajaran divisi Polri ini bisa mengembangkan lebih lanjut ketika nanti Komisi III kembali untuk membahas KUHP dan juga terjadwal dalam prolegnas tahun 2019 – 2024 ini pembahasan tentang KUHPA yang bahkan tidak tertutup kemungkinan itu akan menjadi inisiatif DPR RI. Nah dalam kesempatan ini saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Kapolri sejauh mana penerapan keadilan *restorative* ini diterapkan. Saya mencatat si memang ada satu dua kasus yang mendapat perhatian publik dan Polri menerapkan keadilan *restorative* ini. Yang saya ingat adalah dalam kasus Kakek Samirin ya di dapilnya Pak Setjen Partai Demokrat Pak Hinca Pandjaitan dimana polisinya tidak menahan tetapi malah jaksanya yang nahan. Kemudian kemarin kami juga berkunjung ke Malang ke Kepanjen dan saya melihat teman-teman Polres di Malang juga cukup mengedepankan prinsip-prinsip keadilan *restorative* dalam penanganan perkara anak ZA itu.

Nah ini minta penjelasan Pak nah itu sisi apresiatifnya, tentu saya mempunyai juga sisi konsennya Pak keprihatinan. Saya melihat dari empat lembaga survei yang menerbitkan survei tentang kepuasan publik terhadap Polri itu empat tempatnya untuk tahun 2019 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya khususnya tahun 2018 itu menunjukkan penurunan. Saya tidak mengimani hasil survei dari lembaga survei mana pun tetapi tentu ini juga harus menjadi konsen kita, yang ada dicatat saya misalnya dari Litbang Kompas, LSI, Alvara dan Indonesia Indikator, ini semua menunjukkan penurunan kepuasan publik terhadap masyarakat pelayanan publik yang diberikan oleh Polri. Kompas misalnya mencatat angka yang luar biasa kepuasan publik terhadap pelayanan publik Polri 82, tapi di tahun 2019 ini turun menjadi 70,8. LSI demikian juga di tahun 2018 itu 87,8% tetapi di tahun 2019 ini 72,1. Tentu ada faktor-faktor yang membentuk persepsi masyarakat karena ini dibentuk juga dari persepsi masyarakat yang terkait dengan kepuasan publik terhadap Polri antara lain barang kali kalau saya duga adalah persoalan-persoalan yang menyangkut penanganan demonstrasi di bulan September itu. Nah mudah-mudahan di tahun 2020 ini bisa ditingkatkan kembali Pak Kapolri sehingga survei kepuasan publiknya juga angkanya menjadi tinggi kembali.

Nah yang terakhir Pak Kapolri, ini *concern* yang tadi sudah disebut oleh adinda saya Arteria Dahlan. Ini soal yang tadi dia sebut sebagai festivalisasi kasus. Kita tentu semua memahami bahwa prinsip penegakan hukum kita belum tergeser dari prinsip *presumption of innocence* praduga tidak bersalah kemudian tidak bergeser menjadi *presumption of guilt* praduga bersalah tetapi terus terang saya konsen Pak Kapolri terhadap beberapa komunikasi publik, beberapa penjelasan dari jajaran Polri termasuk dari barang kali humas dan juga Bareskrim juga di daerah, dimana seolah-olah

memberikan ruang untuk terciptanya pergeseran dari *presumption of innocence* menjadi *presumption of guilty*. Saya beri contoh misalnya pengungkapan kasus pembunuhan Hakim Jamaludin di Medan itu satu contoh kasus saja. Dimana tentu memang masyarakat menginginkan agar mendapatkan informasi diungkap tapi kan begitu kemudian muncul berita bahwa Polri telah menangkap otak pembunuhan Hakim Jamaludin artinya ini menciptakan ruang untuk terjadinya *trial by press*.

Saya kira menurut saya ini harus ditata kembali juga pengungkapan ini kalau dibandingkan dengan katakanlah yang kasus menghebohkan baru-baru ini siapa Renald Sinaga. Saya pada saat itu masih ada disana saya tahu bahwa Scotland Yard itu sedang melakukan penyelidikan di sana tetapi tidak pernah diungkapkan itu sampai kemudian diputus oleh pengadilan baru terjadi penggugatan besar-besaran berapa jumlah korban yang dianggap menjadi korban dari si Sinaga ini. Nah barang kali kalau kami boleh berharap ini supaya bisa ditata kembalilah pengungkapan-pengungkapan ini di ruang publik.

Saya kira hanya itu Pak Kapolri. Kayu dipotong menjadi papan, papan ditata untuk menjual durian, demikian saya punya tanggapan semoga Pak Kapolri memberikan perhatian.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik, sudah 10 Fraksi yang memberikan pertanyaan dan masukan, 9 Fraksi maaf. Kita masih punya waktu 55 menit. Saya persilakan Saudara Kapolri untuk memberikan jawaban kalau bisa singkat-singkat padat saya berikan kira-kira 20 menit, saya persilakan.

KAPOLRI (Drs. IDHAM AZIS, M.Si):

Terima kasih atas waktu yang diberikan.

Mohon izin yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Bapak-bapak sekalian, dari Pak Herman Hery, Bang Desmond, Bang Ahmad Sahroni, Ibu-ibu juga, Pak Arteria Dahlan, Pak Supriyansah, Pak Taufik Basari, Pak Cucun, Pak Mulyadi, Pak Habib Aboe Bakar. Kemudian semua ini tentu akan menjadi bagian kami untuk lebih memacu diri, lebih memotivasi diri lagi agar kami lebih baik lagi di dalam berkarya untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Kami terus berkomitmen untuk mewujudkan postur Polri yang lebih profesional, modern dan terpercaya, dan tanpa perhatian dan dukungan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian tentu kami bukanlah siapa-siapa.

Kemudian masalah pembinaan karir yang ditanya oleh Bapak Habiburokhman dan Pak Mulyadi serta mungkin dari Pak Sarifudin Suding. Saya sendiri ingin menyampaikan bahwa saya sangat memberi perhatian kepada teman-teman Brimob, karena saya sebenarnya juga Brimob jadi jiwa

saya ada di Brimob. Saya tahu persis bagaimana, karena saya juga banyak di lapangan. Kemarin seluruh Kombes yang mengikuti operasi Nemangkawi saya berikan tiket holder untuk seluruhnya masuk Seskoad TNI. Kemudian seluruh Danyon, Danden yang nanti sespimen ini juga saya beri prioritas. Bahkan saya sudah minta kepada ASDM, kalau memang ada kuota bisa kita tambah untuk pendidikan SIP atau Sespimen saya minta dilakukan. Terus nanti masalah anggarannya apakah bisa kita ambil dari dana samsat atau yang lain-lain biarlah ASDM sama Asrena tapi ini bagian dari perhatian saya khususnya kepada anak-anak yang melaksanakan tugas operasi-operasi khusus baik itu di Tinombala Poso Sulawesi Tengah maupun itu yang di Papua Nemangkawi.

Bapak-bapak sekalian,

Bahkan untuk pelaksanaan PON nanti saya sudah minta secara khusus di rapim kemarin kalau perlu ini dibentuk Satgas yang dipimpin oleh bintang dua, wakilnya bintang satu dan kalau di sana dia berhasil, saya langsung *reward* untuk menjadi Kapolda tipe A maupun ini, seperti itu. Kemudian masalah *reward and punishment*, saya juga betul-betul konsisten menerapkan itu. Selama saya jadi Kapolri sudah tiga kali saya mengeluarkan TR dihadapan Bapak-bapak yang terhormat sekaligus saya melaporkan strategi saya untuk pembinaan karir ini seluruh Adhi Makayasa saya angkat seperti yang juga Bapak Ketua Komisi III bilang memang saya sampaikan seluruh yang bintang tiga ini kecuali Bapak Irwasum, semuanya mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama bahkan yang masih bintang dua pun semua mempunyai kemungkinan yang sama untuk menjadi Pimpinan Polri. Silakan bermain di kolamnya jangan SMS (Senang Melihat Teman Susah, Susah Melihat Teman) serahkan takdirmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memilih kamu untuk menindaklanjutan estafet kepemimpinan.

Seperti itu Bapak-bapak sekalian dan saya akan silakan nanti Bapak-bapak cek ini lagi musim seleksi saya akan memberikan perhatian khusus. Tidak saja itu tetapi juga mereka-mereka yang ada di Densus, yang ada di Satgas Narkoba semua saya sudah minta ASDM untuk mendatakan. Begitu juga kepada personil-personil yang ada di daerah-daerah tertentu misalnya Papua, NTT, Ambon mereka kita beri prioritas seperti janji saya waktu di *fit and proper test* tidak perlu terlalu sempurna tetapi dia cukup untuk NKRI kita akan didik khusus. Demikian Bapak.

Kemudian Sespimen dikbang juga seperti itu sudah, kemudian untuk mutasi saya juga terima kasih Pak Mulyadi kalau memang nanti ini memang tidak bagus kalau dari Polres satu pindah, pindah lagi kesitu harus dia, supaya dia matang dia harus pindah-pindah ke luar daerah Pak. Saya tahu maksud Bapak jadi kalau di Sumbar jangan pindah lagi di Sumbar begitu ya Pak. Saya terima kasihlah Pak, saya akan perhatikan semua itu Pak.

Kemudian kasus untuk saya acak saja Pak masalah Pak Taufik Basari saya jawab dulu. Saya sudah bentuk tim untuk Lutfi itu, kebetulan waktu itu saya yang memimpin proses saya masih Kabareskrim dan saya sudah

sampaikan tim itu. Bagi saya yang namanya ada kejadian seperti itu kalau memang terbukti anggota harus diproses tentu sudah saya hadirkan Kadipropam di semua kasus. Ketika terjadi kasus di Kendari ada mahasiswa yang mati saya buka tidak perlu kita ragu kalau memang anggota salah harus kita tunjukkan salah. Saya pun juga menyampaikan kepada Lutfi dan pengacaranya kalau nantinya tidak benar itu ada kosekuensi hukum sehingga kita *fair-fair* saja. Kalau nanti hasil pemeriksaannya memang dia melanggar anggotanya berarti kita proses, kalau tidak ya tentu kita akan juga merehabilitasi.

Kemudian masalah perbedaan penjelasan antara Polri dan Kejaksaan tentang kasus kondensat saya minta nanti Kabareskrim silakan lanjutkan tolong dijelaskan karena ada beberapa pertanyaan, setelah itu masalah yang pertanyaan dari Bang Arteria masalah saya minta Pak Kapolda Jatim silakan menjelaskan karena ada dua tiga pertanyaan.

Silakan Pak Kabareskrim.

KABARESKRIM (Irjen Pol. Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO M.Si):

Terima kasih Bapak Kapolri.

F.PDI-P (ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H.):

Izin Pak Ketua sedikit nambahi satu detik.

KETUA RAPAT:

Iya silakan.

F.PDI-P (ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H.):

Itu saya tadi hanya kurang sedikit Pak, ini juga pengusutan kasusnya Pak Hary Tanoe juga belum saya tanyakan tadi Pak katanya SP3 alasannya apa. Sama Asabri ini sejak tanggal 15 Januari sudah ditangani sama Kepolisian *progresnya* sejauh mana Pak. Kami punya tiga panja, Bapak punya Kejaksaan ada menangani Jiwasraya, Asabri pakai Polisi tetapi kita belum dengar perkembangannya seperti apa.

KABARESKRIM (Irjen Pol. Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO M.Si):

Terima kasih.

Yang terhormat Bapak Ketua Komisi.

Bapak Kapolri mohon izin. Kami menjelaskan terkait pertanyaan kasus Honggo. Kasus ini memang kasus korupsi yang sangat besar, karena memang kerugiannya mencapai US\$2,7 miliar atau kalau dirupiahkan Rp37 triliun. Izin melaporkan bahwa kasus ini memang sudah diproses dari tahun 2015 dan sempat tertunda, karena memang ada satu pelaku yaitu Saudara Honggo yang posisinya berada di luar negeri.

Kami laporkan secara singkat bahwa kami sudah melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung Pak, jadi untuk hari ini tersangka Joko dan Raden Priyono sudah kita serahkan dalam posisi tahap II Pak, sedangkan untuk tersangka Honggo kita serahkan berkasnya dan akan diproses untuk peradilan in absentia.

Jadi secara tuntas kasus tersebut sudah kami limpahkan, namun demikian Pak kami tetap berupaya untuk mencari Saudara Honggo dengan bekerja sama dengan Hubinter untuk mencari posisi yang bersangkutan, karena memang ada syarat-syarat tertentu untuk bisa menghadirkan yang bersangkutan karena ini terkait dengan hubungan bilateral antara dua negara yang tentunya ini harus kami penuhi tapi pada prinsipnya Pak untuk kasus Honggo ini kami berupaya untuk menuntaskan sehingga kasus ini juga menjadi halangan terkait dengan upaya pengembangan kilang minyak di Tuban Pak. Jadi kami juga tuntaskan hal ini, jadi hari ini sudah kami serahkan tahap II untuk kasus tersebut.

Kemudian terkait dengan kasus Asabri Pak kami sudah melaksanakan koordinasi dengan rekan mitra kita di BPK RI saat ini kita sedang melaksanakan penyelidikan dan kami bekerja sama untuk melaksanakan audit gabungan Pak *join* investigasi, untuk prosesnya saat ini sedang berjalan Pak. Untuk sementara itu yang bisa kami laporkan.

Terima kasih.

KAPOLRI (Drs. IDHAM AZIS, M.Si):

Silakan Bapak Pak Luki dulu untuk yang kasus yang Surabaya nanti beberapa pertanyaan beliau baru saya lanjut. Silakan.

KAPOLDA JAWA TIMUR (Irjen Pol. Drs. LUKI HERMAWAN, M.Si):

Terima kasih atas waktunya.

Yang saya hormati Pimpinan Rapat dan Para Pimpinan Komisi sekalian,

Mohon izin Bapak Kapolri kami menyampaikan terkait dengan apa tadi yang ditanyakan oleh Bapak Arteria. Kami laporkan terhadap kasus MeMiles atau kasus investasi bodong ini kami sudah selalu sampaikan kami laporkan secara transparan dan sebelumnya karena ini menjadi perhatian publik kami mendapat arahan langsung dari Bapak Kapolri pada saat itu untuk memproses kasus ini secara tuntas sampai akarnya dan kami juga didukung oleh pembina fungsi dari Bareskrim untuk memberikan arahan terkait kasus ini sehingga kami sampaikan bahwa kasus ini secara konstruksi hukum ini sudah jelas dan kami melalui proses yang panjang dari bulan Agustus kami melakukan di awal bulan Agustus dimana dalam pernyataan dari hasil rapat dari Satgas dari waspada investasi menyatakan bahwa MeMiles ini adalah ilegal dan kami dari situ bahkan bersama-sama tim dari Mabes saat itu melakukan mengikuti perkembangan kasus ini dan akhirnya di Desember, awal Desember kami melakukan langkah-langkah upaya hukum di Jakarta

dengan beberapa kantor sudah mendapat bukti-bukti yang kuat. Dimana kantor-kantornya yang tidak sesuai dengan izin yang harusnya izinnnya di A tetapi kantor situ tidak ada dan ini menunjukkan bahwa PT Kam and Kam ini memang sudah banyak sekali kekurangan-kekurangan dan dari beberapa kali rapat pertemuan dari Pimpinan-pimpinan ini bahkan akan di akhir tahun akan ditutup dan pindah ke Vietnam. Dari situlah kami cepat lakukan penyegelan, penutupan rekening-rekening dan di awal Januari kami melakukan *press release*.

Jadi kami sampaikan bahwa Polda Jawa Timur dengan di dukung dari Satuan Mabes Polri dari sebagai pembina fungsi dan juga dari tim IT dari Mabes kami terus dan sampai saat ini kami laporkan bahwa kasus ini terus berkembang. Kami akan menyelamatkan *member* dana atau pun uang, bukan uang dari keuntungan daripada PT Kam and Kam, ini adalah betul-betul uang para *member* yang dibuat pesta pora oleh para karyawan atau para struktur yang ada orang-orangnya sampai ada yang bangun rumah senilai 10 miliar yang berada di wilayah Kepala Gading dan ini dalam proses penyegelan juga. Jadi memang uang itu dipakai diputar oleh saudara pimpinan yaitu Saudara inisial Sanjay dan ini dibuat pecah-pecah ke rekening-rekening lain. Dari situlah kami terus saat ini, per hari ini kami sudah menyita 136 miliar yang diawal 122 dan 136 per hari ini dan *insya Allah* masih ada beberapa aset benda bergerak mobil-mobil yang kami juga akan terus lakukan penyitaan, dan nanti ini semuanya kami akan serahkan sesuai dengan aturan nanti apakah ini dikembalikan nanti pengadilan lah yang akan menentukan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

KAPOLRI (Drs. IDHAM AZIS, M.Si):

Mohon izin Pak Arteria nanti saya minta Kabareskrim, Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jatim untuk kasus kilang Banggai Amonia kemudian kasus Garuda, kasus perkara tanah, kasus Hary Tanoe dan Asabri saya minta nanti dibuatkan lapju kalau bisa dikasih waktu khusus mungkin besok atau lusa untuk menerima Kaba sehingga Bapak bisa lebih dapat jelas penggambarannya Pak ya kalau berkenan.

KETUA RAPAT:

Pak Kapolri sedikit masukan dari saya.

Saya tahu suasana kebatinan dari seluruh Anggota Komisi III terkait kasus-kasus yang disebutkan tadi, kasus-kasus besar. Untuk memuaskan suasana kebatinan itu sehingga tidak berkepanjangan terus bertanya-tanya Komisi III memiliki Panja Penegakan Hukum. Saya menyarankan kita jadwalkan nanti suatu hari sebelum reses untuk memanggil Kabareskrim, Jampidsus dan pihak terkait supaya kita menggelar rapat tertutup semacam suatu gelar perkara sehingga kita tahu betul kasus-kasus ini sejauh mana sehingga kalau kita bahas di dalam RDP Raker kaya begini terlalu singkat waktunya. Jadi nanti kesimpulan rapat kita bahwa Komisi III meminta Kapolri untuk menugaskan Kabareskrim dan akan meminta kepada Kejaksaan, kita meminta untuk mengadakan rapat khusus saya kira itu Pak Kapolri.

Terima kasih, silakan dilanjut.

F.PDI-P (ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H.):

Terima kasih Ketua.

Sepakat Ketua, ini kami juga punya nama-namanya Pak Hary Tanoe dan kawan-kawan sudah ada ini apa diserahkan atau bagaimana.

KETUA RAPAT:

Saya kira nanti saja nanti di panja saja.

KAPOLRI (Drs. IDHAM AZIS, M.Si):

Kami bisa lanjutkan Pak.

Pak Supriansa dari Fraksi Golkar kami nanti juga akan berkoordinasi dengan bea cukai tetapi saya juga akan minta Kabareskrim dan Kapolda Metro Jaya biar bergabung membuat tim untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan masukan Bapak. Terima kasih masukan Bapak.

Kemudian Fraksi Gerindra tadi Pak Habiburokhman kami sudah jawab *insya Allah* nanti saya sampaikan sama Pak Kapolda Jatim tentang pemanggilan Mulan Jameela dilihat dulu asas manfaat dan mudaratnya, memang karena artis mungkin ini Pak, jadi bagus kalau manggil yang biasa-biasa saja mungkin tidak terlalu *booming*. Seperti tadi yang saya sudah laporkan Pak kesempatan Pamenses, pim sespimen sekolah unggulan terima kasih tetapi prinsipnya rekrutmen itu tidak mungkin meniadakluluskan orang yang lulus, masalahnya mungkin hanya kalah rangking saja Pak. Yang lulus 200 yang diterima hanya 150 Pak, ya itu yang nanti akan kita komunikasikan kita pikirkan.

Kemudian Bang Taufik Basari kami terima kasih, seluruh kasus-kasus ini saya sudah minta khusus dengan Kadipropam ini juga bisa Pak nanti secara ini komunikasi lebih lanjut untuk Abang bisa mengecek perkembangannya. Saya akan keluarkan TR saja Pak telegram untuk memberikan perhatian yang serius supaya tidak boleh satu pun anggota yang melakukan penyiksaan. Sebenarnya Perkabnya sudah ada tapi saya mau meyakinkan sama Bapak yang di depan Dewan yang terhormat bahwa ini semua oknum. Nah kalau oknum kita bikin jelas kalau dia memang salah ya kita tindak tapi kalau dia juga tidak salah kita harus klarifikasi seperti itu mohon izin.

Kemudian Kang Cucun terima kasih atas apresiasinya Pak, ini masalah kerajaan-kerajaan ini sudah tiga Pak yang kita proses baik di Jateng, di Jabar. Memang kalau raja banyak Pak, jadi presiden sebenarnya banyak jadi mungkin eranya lagi banyak ingin jadi raja tapi kalau ada anu ya kita proses Pak seperti itu.

Kemudian masalah pilkada serentak saya juga meyakinkan seluruh Anggota Polri netral, aturan mainnya sudah ada. Di kemarin seluruh Pati Polri

saya sampaikan apabila ada Polri yang mau turun ke pilkada segera lapor tidak dalam waktu yang lama saya keluarkan TR-nya supaya jangan menyeret-nyeret Polri untuk tidak netral terhadap pelaksanaan pilkada seperti itu Pak.

Kemudian Pak Mulyadi kami juga berterima kasih, kasus Honggo tadi saya kira sudah dijawab Pak tentang apresiasinya dan kami akan perhatikan semua Pak, masukan-masukan dari Bapak. Masalah narkoba, jelas kebijakan saya semuanya harus ditindak meskipun strategi kita Pak preemtif, preventif dan penegakan hukum kita juga bekerja sama dengan semua *stakeholder* BNN kemudian termasuk Bakamla. Mungkin Bapak masih ingat kasus 1,6 ton itu bersama-sama bahkan bersama TNI Angkatan Laut Pak dan Bea Cukai karena kami tidak punya kapal kalau sudah terlalu jauh keluar di Samudra di Selat Malaka.

Kemudian Pak Habib Aboe Bakar kami juga berterima kasih atas apresiasinya Pak. Yang anggota Densus ini sudah kita proses, kita lagi melakukan proses pengembangan dan saya yakinkan juga Pak kejadian-kejadian seperti ini mereka adalah oknum dan kita luruskan. Kemudian masalah *cyber* memang sudah jadi ini Pak tapi Polri sudah membesarkan organisasinya ada Direktur Cyber, di BIG ada di Direktur Kamsus, di Humas ada Direktur Karo Multimedia, ini semua bersinergi dipimpin oleh Kabareskrim untuk membentuk tim. Saya tahu ini timnya ada Brigjen Rahmat Wibowo dibelakang dia yang mengomandani dan sudah membentuk juga satu tim subdit patroli khusus patroli *cyber*. Memang tantangan kita kedepan Pak apalagi mau pilkada ini pasti tantangannya seperti itu. Jadi saya tidak asing Pak kalau Papua begitu banyak, karena saya bolak-balik kesana untuk memantau operasi Nemangkawi dan pelaksanaan persiapan PON Pak, jadi saya bisa memonitor betul.

Kemudian dari Fraksi PAN Pak Sarifuddin Suding tentang kejadian di PT IKA. Mohon izin Pak, kejadian di PT IKA ini kami waktu hari kejadian sebenarnya ada agenda Bapak Wapres paginya itu akan melaksanakan olahraga pagi. Ini sudah menjadi kebiasaan Bapak Wapres di Mako-mako TNI Polri dalam satu minggu dua kali beliau keliling. Salah satu manajemen *by silaturahmi* yang beliau terapkan selama ini. Kebetulan kami kena giliran di PT IKA sesuai dengan protap Waskita sejak malam itu *diclearkan* di sana. Terus ketemu misalnya beberapa penyelidik KPK itu Polri tidak tahu apa prosesnya yang ada di dalam begitu Pak, itu yang saya tahu yang dilaporkan oleh Bapak Gubernur PT IKA dan Kadiv Propam tentang kasus PT IKA.

Namun saya ingin sampaikan Pak beberapa hari yang lalu Pimpinan KPK telah mengirim surat kepada kami secara resmi untuk meminta bantuan dilakukan penyelidikan kepada tersangka Harun HM ini untuk meminta bantuan. Nah ini juga sudah pernah kita lakukan ketika dulu kasus E-KTP kalau saya tidak salah, Ibu Mariam itu dulu kami yang lakukan. Mungkin sementara itu Pak karena penyelidikan dan penyidikannya ini ada di KPK kami tidak, dan nanti kami masuknya setelah kami mendapat bantuan untuk membantu penyelidikan.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Kapolri.
Silakan Pak Suding.

F.PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Bukan itu yang saya tanyakan Pak Kapolri, yang saya tanyakan apa memang betul Harun Masiku bersama seseorang ada berlindung di PT IKA pada saat kejadian.

KAPOLRI (Drs. IDHAM AZIS, M.Si):

Kami secara pribadi mau pun ini kami tidak tahu Pak masalah itu. Mungkin informasi di luar sedang berseliweran sendiri tidak tahu.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Benny interupsinya.

F.PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Baik, saya tanya sedikit berkaitan dengan itu tadi Pak.
Kalau bisa dijelaskan dengan gamblang informasi yang disampaikan kepada kami betul atau tidak bahwa penyidik KPK pada saat itu disekap semalam suntuk satu Pak. Yang kedua, supaya kita *clear* Pak ya supaya jangan ada spekulasi yang tidak jelas ujung pangkalnya.

Kemudian yang kedua, kenapa Harun Masiku kesana ke PT IKA itu juga menjadi pertanyaan. Setelah dilacak kuat dugaan Harun Masiku ke sana sebab katanya Kepala Ketua PT IKA itu mantan Direktur Penyidik KPK ya kenal baik juga dengan Pak HM tadi, mungkin karena satu kampung atau apa, tidak tahu saya mungkin ini mesti dijelaskan Pak karena ini jadi tanya-tanya juga kenapa HM itu ke PT IKA ada apa di sana, itu saja Pak Ketua.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik cukup. Silakan Pak Kapolri lanjut.

KAPOLRI (Drs. IDHAM AZIS, M.Si):

Saya tidak mau berandai-andai di ruang terhormat ini tapi yang jelas yang pertama kalau tidak ada kata penyekapan, satu. Bahwa iya karena paginya mau ada kegiatan Bapak Wapres tentu orang yang mereka dengan dalih mau sembahyang mau apa dilakukan pemeriksaan oleh provos PT IKA. Kemudian apakah hadir disana karena hubungannya sama Gubernur PT IKA saya juga tidak mau berandai-andai di ruangan ini, yang jelas saya tidak tahu kalau yang bersangkutan ada di PT IKA. Terima kasih Pak.

F.PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E.):

Ketua tambah sedikit saja Pak Ketua, sedikit cuma menyangkut narkoba sedikit Pak Ketua.

Pak Kapolri saya berterima kasih jawaban tadi soal narkoba tetapi saya ingin lebih keras lagi bukan sekedar yang Bapak jawab tadi. Saya inginkan ada diekspose tiap penangkapan orang-orangnya ditunjukkan dan disampaikan ke publik wajahnya dan kalau perlu langsung diberi tindakan hukum yang keras. Tidak boleh berlama-lama menyangkut masalah narkoba ini ini yang saya inginkan semoga bisa mendapat atensi.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik lanjut Pak Kapolri.

KAPOLRI (Drs. IDHAM AZIS, M.Si):

Langsung kami jawab saja Pak Habib.

Kebijakan saya jelas apalagi kalau itu menyangkut bandar narkoba dari asing harus dilakukan tindakan tegas yang terukur tentunya Pak, tindakan tegas yang terukur karena kita inikan aparat penegak hukum seperti itu Pak. *Insyah Allah* itu saya tetap akan komit seperti itu. Kemudian ini sekaligus jawaban saya buat Bapak Sarifudin Suding dari Fraksi PAN tentang narkoba tadi kemudian Anggota Brimob kami sudah sampaikan Pak kami akan memberi perhatian khusus kepada adik-adik kita khususnya dari Brimob bahkan bukan dari Brimob saja tentu Densus, *monitoring center*, satgas narkoba dan satgas-satgas yang lain. Saya juga senang Pak selaku Kapolri kalau semua anggota saya pintar soalnya saya sedikit agak-agak tidak pintar seperti itu.

Kemudian yang terakhir pertanyaan Bapak kasus NB sampai hari ini Pak kasus itu sudah berjalan tentang motifnya yang sampai hari ini dilakukan oleh penyidik yang mereka para tersangka ini dongkol saja sama Novel Baswedan. Saya sudah mengatakan sejak penangkapan ini secara pribadi saya mengapresiasi satgas yang melakukan penangkapan ini Pak Kabareskrim dan tim, namun dibalik itu juga sebagai Pimpinan Polri sebagai orang tua tentu saya juga merasa prihatin. Namun untuk menunjukkan bahwa mereka ini ya kita proses, biarkanlah nanti di sidang pengadilan yang terbuka akan bisa terjawab semua apa yang menjadi motivasinya Pak, seperti itu.

Kemudian kami lanjut ke Fraksi PPP Pak Arsul Sani terima kasih atas apresiasinya tentang *restorative justice* ini Pak, memang saya kira diterapkan juga di beberapa wilayah tapi ini menyangkut diskresi para penyidik. Merekalah di lapangan yang akan mempertimbangkan apakah ini *restorative justice* ini diterapkan. Biasanya juga ini di kasus-kasus kecelakaan Pak, kecelakaan lalu lintas para penyidiknya juga mengambil tindakan *restorative justice* Pak. Saya kira sudah cukup banyak Pak datanya nanti kalau Bapak

berkenan ini juga bisa kita bikin laporan resmi nanti untuk disampaikan ke Komisi III.

Tentang hasil survey, kalau memang hasil survey di tahun 2019 kemarin kita ada penurunan mungkin banyak indikator yang menyebabkan itu Pak, karena kita melaksanakan pengamanan legislatif, pengamanan Presiden dan beberapa kegiatan yang lain, namun di depan Bapak-bapak sekalian kami selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik Pak di dalam pelayanan masyarakat. Semoga di tahun 2020 ini kita semua bekerja keras untuk memberikan pelayanan yang terbaik sehingga mungkin bisa naik. Saya sering bilang di depan para perwira saya Polisi ini berbuat baik saja belum tentu dinilai baik oleh masyarakat, apalagi dia berbuat tidak baik. Jadi kita tidak boleh berhenti untuk tidak berbuat baik, itu Pak kata kuncinya.

Kemudian masalah festivalisasi kasus, saya juga akan berterima kasih Pak nanti saya akan beri masukan kepada Kadiv Humas untuk mengontrol. Biasanya teman-teman penyidik di Polda-polda di Polres ini kadang-kadang dia terlalu euforia dia senang Pak padahal itu tidak membuat tidak bagus tidak elok untuk dijadikan pemberitaan Pak. Terima kasih atas masukan Bapak, ini mungkin merupakan obat bagi saya dan institusi untuk lebih berbenah dan memperbaiki diri Pak, terima kasih.

Mungkin yang terakhir kami jawab dari meja Ketua, yang pertama terima kasih Bang Roni kami nanti akan bicarakan apakah ini tidak saling tumpang tindih antara Pam Obvid maupun Brimob tentang pengamanan di Parlemen. Kemudian untuk Bang Desmond kami juga berterima kasih atas masukannya sebenarnya di dalam 7 program kami tentang penegakan pemantapan Harkamtibmas itu sudah mengedepankan fungsi lalu lintas Sabhara, namun tadi konteksnya Binmas karena pertanyaan yang diajukan Komisi III menyangkut semua hal-hal yang kita khusus yang kami jawab.

Lalu yang terakhir yang mulia Bapak Ketua Komisi tentang azas kekeluargaan, *reward and punishment* tadi dan apresiasi Bapak sekaligus saya jawab tahun 2019, 1.800 Brimob yang dididik langsung dengan dikjur kemampuan. Lalu rencana tahun 2020 ini akan mendidik sejumlah 2.000 Brimob, itu mungkin Pak proses penambahannya dan yang terakhir masalah struktur organisasi memang sedang kita ajukan Pak kita ajukan semua ke Menpan termasuk humas, kor korupsi, 7 Polda type B namun semua itu *by* proses yang sekarang sedang di verifikasi oleh Deputy Kementerian di PAN.

Saya kira itu Pak beberapa jawaban kami selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Saudara Kapolri.

Jawaban yang lugas, singkat, padat, jelas. Sebelum saya melanjutkan tadi awal rapat ini kita mulai saya lupa memperkenalkan ada wajah baru Komisi III ini terlalu banyak yang ganteng tetapi tambah satu yang cantik juga akan menambah semaraknya Komisi III. Kami persilakan kepada Ibu Ary

Egahni Ben Bahat memperkenalkan diri menyebutkan nomor Anggota dan dapil dan serta partainya.

F.P-NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H.)

Baik.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Syalom, Om Swastiastu.*

Maaf saya biasa di Kalimantan Tengah Pak, ada salam khusus tidak apa-apa ya saya ucapkan salam

Tabe Selamat Lingu Nalatai, Salam Sujud Karendem Malempang

Karena saya asli orang Dayak Kalimantan Tengah. Baik nama saya Ary Egahni Ben Bahat saya dari Fraksi Partai Nasdem Daerah Pemilihan saya Kalimantan Tengah dan saya senang sekali tidak hanya di Institusi Polri ada mutasi dan rotasi, di Fraksi Partai Nasdem pun ada rotasi. Saya tadinya di Komisi I dan ketemu Pak Prabowo kemarin sekarang saya ketemu Pak Kapolri senang sekali.

Terima kasih.

Tuhan Memberkati.

KETUA RAPAT:

Baik sudah kita perkenalkan kemudian masih ada waktu sisa lebih kurang 30 menit. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman. Sebentar saya belum selesai berbicara, sebentar.

Dua puluh menit ini barang kali bisa kita isi sebelum kita sebelum kita bikin kesimpulan, dua sampai tiga pertanyaan yang prinsip untuk Anggota-anggota yang sudah bertanya sudah bicara tadi cukup. Barang kali saya kasih tiga Anggota. Sebentar, saya yang menentukan. Tiga orang, masing-masing 3 menit sehingga 10 menit supaya jam 13.00 WIB tepat kita bisa menyelesaikan rapat ini. Pertama, saya berikan kepada Ibu yang baru Egahni. Sebentar lbunya mau bicara 3 orang.

Silakan Bu.

F.P-NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H.)

Baik, terima kasih.

Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus.

Pak Kapolri pada tanggal 14 Desember 2019 saya sebagai Anggota DPR RI dipaksa bertemu oleh 40 ormas se-Kalimantan Tengah yang peduli dengan para peladang tradisional. Mereka melakukan aksi bela peladang tradisional dan mereka menyampaikan petisi kepada saya. Intinya berdasarkan data Polda Kalimantan Tengah dari 161 kasus para peladang tradisional yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 ada 121 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 20 kasus

korporasi terkait kebakaran hutan dan lahan itu hanya 2 perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu PT Palmindo Gemilang Kencana dan PT Gawi Bahandep Sawit Mekar. Nah intisari dalam pertemuan itu mereka menyampaikan perlu saya sampaikan atmosfer di Kalimantan Tengah bahwa saya asli Putri Dayak Kalimantan Tengah dan kebetulan suami saya anak petani miskin dan petani di Kalimantan Tengah peladang itu yang membakar lahan untuk membuka lahan pertanian adalah satu bentuk budaya lokal orang dayak asli. Mereka ketika membuka lahan mereka ada ilmu-ilmu tertentu Pak Kapolda, jadi melihat arah angin kemudian mengawal lahan ketika misalnya lahan itu 20x30, hanya 20x30 yang terbakar tidak lebih dari itu, dan ketika di pelajari tentang tanah yang struktur tanah yang ada di Kalimantan Tengah tanahnya adalah lahan gambut dan lahan mineral, dan 90% dari peladang tradisional ada di hulu-hulu daerah yang tinggi bukan di lahan gambut.

Jadi yang terjadi akhir-akhir ini ketika karhutla terjadi di Kalimantan Tengah yang dikambinghitamkan penyebab karhutla adalah para peladang tradisional tetapi data faktual yang terjadi di lapangan adalah ternyata karhutla terjadi di izin-izin yang diberikan kepada izin konsensasi yang diberikan kepada korporat. Nah oleh karena itu saya melihat kesenjangan dalam penegakan hukum disini. Kami mohon Bapak Kapolri sangat peduli dengan ini, karena terus terang kemarin ada petani yang 86 tahun usianya sudah tua renta sebatang kara Pak Kapolri, ditahan dan sudah diputus 6 bulan. Saya menangis dan saya waktu itu mengajukan untuk penangguhan penahanan tidak bisa dan ditahan.

Iya memang regulasi memang melarang untuk itu tapi kami berharap bagaimana juga penegak hukum untuk dapat memahami secara jelas bahwa tidak hanya semata-mata tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 69 secara utuh tetapi juga diperhatikan tentang penjelasan Pasal 2-nya sehingga secara korelasi dapat memberikan suatu keputusan hukum yang baik, bukan berarti kita tidak taat hukum tetapi juga melihat kearifan lokal dan lebih dari itu azas-azas kemanusiaan lebih dipertajam. Saya senang dan mengapresiasi Pak Kapolri sangat humanis dan saya berharap jajaran Polda-polda se-Indonesia termasuk Polda di Kalimantan Tengah pun harus humanis untuk melakukan pendekatan ini.

Kedua, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa tadi disinggung tentang ilegal mining saya menginformasikan Kalimantan Tengah ada 13 Kabupaten dan 1 Kota. Kebetulan di Kabupaten Kapuas dimana suami saya ada sebagai Bupati di sana, ada kasus baru-baru ini Pak Kapolri bahwa di bahu jalan 25 meter dari tepian jalan di sekitar Kabupaten Kapuas kurang lebih 3 tahun ini sudah terjadi yang namanya penambang ilegal dengan menggunakan excavator dan mesin sedot, yang kurang lebih ada di Kecamatan Kapuas Tengah dan Pasak Talawang, dan excavator ini selalu beroperasi siang dan malam. Pak Bupati sudah menyurati tetapi tidak ada respon sama sekali

KETUA RAPAT:

Baik cukup Ibu waktunya habis.

Yang berikut perempuan, Ibu yang di belakang silakan.

F.P-NASDEM (EVA YULIANA, M.Si):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Komisi III,
Seluruh sahabat Anggota Komisi III dan,
Yang saya hormati Bapak Kapolri beserta jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini.

Yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama Pak saya berterima kasih dan mengapresiasi Pak Kapolri dalam mengorkestrasi cipta kondisi operasi cipta kondisi dalam Natal dan Tahun Baru pada akhir dan awal tahun lalu. Kami merasakan betul baik lancar dan *alhamdulillah* kita semua diberi kondisi yang aman dalam melaksanakan Natal dan Tahun Baru khususnya di tempat saya di Jawa Tengah dan lebih khusus lagi di Solo, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali tempat dimana daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih terhadap kasus-kasus yang kita khawatirkan terjadi pada Natal dan Tahun Baru *alhamdulillah* ini tidak terjadi Pak.

Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan pada saat saya reses yang lalu yang dimana saya melakukan keliling bersama dengan Pak Kapolda dan juga Pak Pangdam dan kita tindaklanjuti dengan para Kapolres di daerah-daerah khususnya di dapil saya, Solo dan sekitarnya.

Pelaksanaan Jumat berkah di beberapa Polres Pak saya rasa ini adalah kegiatan yang cukup baik yang mungkin bisa ditularkan ke di tempat-tempat yang lain. Dimana Polres bersama Kodim melaksanakan kegiatan sosial yang mengajak beberapa *stakeholder* di masing-masing daerah yang tidak menggunakan anggaran negara, tidak menggunakan APBN dan tidak menggunakan APBD. Mereka iuran pada saat melakukan apel hari Senin itu langsung diadakan iuran, dan iuran itulah, dana itulah yang kemudian disalurkan untuk melaksanakan kegiatan sosial di Jumat berkah bersama dengan *stakeholder* masyarakat. Ini tentu kegiatan ini tentu akan menguatkan citra dan hubungan Polisi, keluarga Kepolisian dengan masyarakat dimana nanti juga pada akhirnya itu akan memberikan nilai baik nilai tambah pada kita semua.

Yang berikutnya Bapak Kapolri yang ingin saya sampaikan adalah saya melihat mungkin perlu ada perhatian lebih dari Bapak tentang kecukupan personil yang ada di Polres Solo, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali dimana lut kegiatan di 4 (empat) Polres ini cukup tinggi terkait dengan aktivitas Bapak RI 1 dan mungkin dengan keluarga.

KETUA RAPAT:

Baik cukup Ibu, saya kira cukup waktunya sudah habis.

F.P-NASDEM (EVA YULIANA, M.Si):

Izin satu lagi Ketua.

Nanti di akhir saya minta izin untuk bisa menyerahkan hasil atau aspirasi kepada Kapolri mewakili, karena waktunya terbatas saya mohon izin bisa menyerahkan ini pada akhirnya nanti.

KETUA RAPAT:

Silakan sekarang silakan.

Baik apa yang disampaikan tadi oleh dua srikandi tadi merupakan masukan untuk Pak Kapolri saya kira itu untuk ditindaklanjuti tidak usah dijawab karena waktunya sudah habis, dan atas kesepakatan kita semua tadi yang saya katakan bahwa ini rapat profesional tetapi azasnya kekeluargaan mari kita saling menghargai, saling menghormati antar kita. Topik yang kita bicarakan saya kira sudah cukup korehensif, maka acara ini saya lanjutkan dengan kesimpulan rapat, jadi untuk sesi tanya jawab sudah selesai.

F.PG (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum):

Interupsi Ketua sebentar saja.

Saya tidak bertanya karena tidak ada waktu tetapi saya kasih waktu menyerahkan berkas saja.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F.PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):

Saya juga Pak Ketua akan menyampaikan secara tertulis kepada Bapak Kapolri.

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Saya juga Ketua satu, tidak bertanya hanya menyerahkan berkas saja.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Karena begitu banyaknya yang akan menyerahkan saya kira tolong tahan diri selesai tutup nanti bisa langsung ke Kapolri untuk bicara. Kita lanjutkan dengan pembacaan kesimpulan. Saya bacakan kesimpulan untuk teman-teman tanggapi.

1. Komisi III DPR RI meminta Kapolri agar badan-badan baik unsur pengawas, pelaksana maupun pendukung Polri termasuk Binmas, Sabhara dan Lantas lebih dimaksimalkan dan bekerja lebih profesional sesuai tupoksinya agar dapat menciptakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, masyarakat merasa terlindungi, diayomi dan

dilayani dengan baik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Saya minta coba teman-teman silakan. Pak Kapolri bagaimana?

KAPOLRI (Drs. IDHAM AZIS, M.Si):

Cukup.

F.PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya silakan.

F.PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Iya poin satu ini saya kira tidak hanya kepada Binmas, Sabhara dan Lantas. Saya kira di unit-unit di institusi Kepolisian juga memang harus kita dorong secara keseluruhan dalam rangka untuk melakukan kinerja yang profesional sesuai dengan tupoksinya, apakah itu di Reskrim, apakah itu di dan sebagainya. Saya kira tidak hanya pada tiga ini karena itu dalam rangka untuk pelayanan publik.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya kira yang poin satu ini lebih pada yang tadi dikatakan oleh Saudara Desmond, polisi yang lebih humanis, polisi yang lebih mengayomi, tidak saja unsur penindakannya tetapi lebih pada menjaga, mencegah, melindungi dan

F.PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Semua institusi-institusi Kepolsian Pak unit-unitnya harus memang humanis begitu loh tidak hanya pada tiga unit ini.

KETUA RAPAT:

Usul Pak Suding apa sekarang coba diubah.
Silakan.

F.PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Di drop saja, pertama coba. Komisi III meminta Kapolri agar badan-badan tanpa ada unit, Binmas, Sabhara itu didrop saja itu, badan-badan dihilangkan. Institusi Kepolisian saja disitu dan saya kira ini kesimpulan sudah

berulang-ulang kali juga. Iya itu agar badan-badan dihapus, di drop itu ya, sampai di pendukung Polri sudah didrop itu. Lebih memaksimalkan dan bekerja.

KETUA RAPAT:

Diganti memaksimalkan.

F.PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Iya sudah begitu saja.

KETUA RAPAT:

Saya bacakan

1. Komisi III DPR RI meminta Kapolri lebih memaksimalkan dan bekerja lebih profesional sesuai tupoksinya agar dapat menciptakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat agar masyarakat merasa terlindungi, diayomi, dilayani dengan baik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Saya kira ini.

F.PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Izin Pak Ketua.

Ini Polri ini tugasnya kan memang sudah ini, sudah ada di dalam undang-undang kenapa lagi kita masukan di dalam satu kesimpulan. Saya rasa ini poin ini tidak penting masih banyak poin yang lebih penting yang harus kita masukan.

F.PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Baik saya putuskan poin ini didrop.

F.PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E.):

Sebentar Pak Ketua tidak perlu di drop.

Ini ada kalimat memaksimalkan itu bagus, yang kedua kalimat humanis jadi penekanan. Bukan sekedar TR Kapolri tetapi menjadi kesimpulan Komisi III dalam pertemuan ini. Kalimat memaksimalkan itu, itu menggambarkan.

F.PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Ini semua

F.PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E.):

Sebentar-sebentar Ketua.

F.PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Saya belum selesai.

F.PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E.):

Ketua sudah menghadap saya kok.

F.PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Belum, saya belum selesai, masih ngomong.

F.PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E.):

Oh.

F.PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Ini semua kan sudah ada di dalam Undang-Undang Kepolisian mempunyai tugas untuk lebih maksimal dan humanis dan selama ini kan kita sudah melihat juga tugas dari para Kapolri dan jajaran semua sudah berupaya sampai motonya itu saja apa Pak tadi promoter, moto promoter ini sudah masuk semua di dalam situ jadi ini kalau dimasukkan buang-buang tempat kesimpulan. Masih banyak tugas-tugas lain seperti misalnya penanganan di Papua, bagaimana dengan polo air pos gartnya, senjatanya sudah ada apa belum dan lain-lain ini lebih bagus dimasukkan dalam kesimpulan dari pada hal-hal yang seperti ini begitu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik yang ini kita drop dulu

F.PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E.):

Ketua sebentar, saya masih usul tidak bisa.

Saya melihat bahwa tema ini bukan sekedar berarti ini ada di undang-undang, ada semua ada di undang-undang yang kita bicarakan tetapi ada kalimat penekanan memaksimalkan artinya ada atensi kita dalam pertemuan rapat ini. Ada catatan-catatan pekerjaan di Polri yang perlu diingatkan kembali. Tambahan lagi satu kalimat kalimat humanis saya pikir perlu ditulis setelah memaksimalkan supaya jelas bahwa polisi-polisi yang di lapangan itu mengerti bahwa humanis itu menjadi kepentingan yang diatensi dalam pekerjaan Kapolri saat ini. Ini usul kami Pak.

KETUA RAPAT:

Baik saya paham ini di drop dulu, nanti soal humanis kita angkat. Kita masuk yang kedua ini di drop. Oke, masuk yang berikut.

2. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar segera mempercepat penuntasan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat seperti kasus Novel Baswedan, kasus kondensat, kasus MeMiles, kasus Taman Sari, kasus Kerajaan Agung Sejagat, kasus Sunda Empire serta kasus-kasus lainnya demi terciptanya rasa aman dan kepastian hukum ditengah masyarakat.

F.PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Izin Ketua.

Menurut saya kasus-kasus ini tidak usah disebutkan Ketua, karena kalau kita sebutkan masih banyak lagi kasus-kasus yang meresahkan masyarakat. Usul konkrit Ketua,

2. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar segera mempercepat penuntasan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat serta kasus-kasus lainnya yang meresahkan masyarakat demi terciptanya rasa aman dan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat.

Jadi coba tolong intinya perhatian dan meresahkan masyarakat demi terciptanya rasa aman dan kepastian hukum.

KETUA RAPAT:

Coba dirubah redaksionalnya.

F.PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E.):

Setuju saya itu, cocok itu.

KETUA RAPAT:

Baik, setuju ya ini ya?

F.PDI-P (ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H.):

Ketua.

Kalau kita sepakat sama konstruksi kalimat yang seperti ini, saya hanya ingin menambahkan kita tadi ada janjinya Pak Kapolri juga agar segera melakukan pembahasan dalam Panja Penegakan Hukum dalam masa sidang

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya tahu itu sebentar.
Ini setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

3. Komisi III DPR RI melalui Panja Penegakan Hukum segera akan mengadakan rapat gabungan dengan Kabareskrim, Jampidsus dan Kapolda Metro Jaya terkait dengan penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat.

F.PDI-P (ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H.):

Ketua, sedikit pertanyaan Ketua.
Ini kenapa Kapolda Metro saja Ketua?

KETUA RAPAT:

Sekarang jangan tanyakan saya, ini kan kesimpulan yang kita tawarkan, kasih usul kasih dong jangan kamu tanyakan saya. Konkrit maunya apa. Ini sama-sama kita putuskan.

F.PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Izin Ketua.
Tadi kesimpulan pertama ini kan hampir sama dengan kesimpulan kedua jadi ini kita gabung.

KETUA RAPAT:

Oke coba staf ahli gabung.

F.PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Dan ditindak lanjuti dengan Panja Penegakan Hukum begitu, disambung disitu. Koma dan ditindak lanjuti melalui Panja Penegakan Hukum begitu. Jadi kita jangan pada dua institusi ini, aparat penegak hukum saja disitu karena bisa juga kita panggil nanti KPK dan sebagainya.

KETUA RAPAT:

Begini terkait kasus-kasus yang saudara tadi Saudara-saudara bicarakan yang menjadi perhatian masyarakat kan saya katakan bahwa Kapolri tidak perlu menjelaskan secara rinci di sini. Sekarang saya agendakan untuk diadakan rapat tertutup lewat panja terkait kasus yang Saudara-saudara sebutkan. Saya kira itu lebih profesional jadi jangan sudah menukik kalian buka lagi menjadi umum. Saya kira ini kita setuju ya?

F.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):

Ketua tambahan poin.

KETUA RAPAT:

Iya silakan

F.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):

Ini kan kita menekankan pada kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat, tadi juga sempat kita tanyakan kepada Kapolri terkait dengan penegakan hukum untuk internal di Kepolisian, karena itu saya usul konkrit kasus-kasus yang menjadi perhatian dan meresahkan masyarakat serta kasus-kasus terkait penegakan hukum internal atau begini serta laporan-laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh oknum internal Polri.

KETUA RAPAT:

Sebentar yang itu beda konteks sama ini. Kita setuju dulu sama ini, apa yang menjadi usul Saudara kita akomodir.

F.PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Ketua sebentar.

Jadi konteksnya di kesimpulan pertama ini dalam kaitan masalah penegakan hukum. Betul kata Ketua tadi bahwa kita bicara dengan Kapolri menghadirkan Kabareskrim dengan Jampidsus tapi saya kira kita jangan mengklaster hanya dua institusi itu bisa saja ini berkembang begitu loh. Jadi menurut saya apakah Kabareskrim dan Jampidsus itu didrop melibatkan aparat penegak hukum dan instansi terkait begitu.

KETUA RAPAT:

Serta penegak hukum lainnya, saya kira itu kata yang paling tepat, tambahkan itu, "serta penegak hukum lainnya".

F.PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.):

Ketua interupsi, Cucun.

Saya lebih sepatutnya Ketua tadi tidak terlalu lari luas sesuai dengan target Komisi III ini buat Panja Penegakan Hukumnya kemarin kan kita terbatas jadi jangan sampai misalkan mana kasus hukum yang digarap Jiwasraya melibatkan aparat hukum yang lain nanti malah jadi kabur kesimpulannya. Kalau kita fokus ya fokus biar targetnya jelas begitu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik saya kira ini yang sudah yang terbaik sudah mencakup keinginan semua orang dan saya kira ini kita putuskan.

(RAPAT: SETUJU)

Yang berikut, ada usul lain untuk kesimpulan yang kedua terkait tadi yang diusulkan oleh Saudara Taufik Basari menyangkut disiplin dan penegakan hukum internal Polri, silakan redaksikan usulannya.

F.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):

3. Komisi III DPR RI meminta Kapolri agar menjamin penegakan hukum di internal Kepolisian terkait laporan-laporan masyarakat.

Bisa dikembangkan lagi silakan kalau mau.

KETUA RAPAT:

Berhenti disitu saya usulkan

3. Komisi III DPR RI meminta Kapolri secara konsisten menjaga disiplin seluruh Anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya serta menindak tegas seluruh Anggota Polri yang melanggar hukum.

F.PDI-P (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Ketua, Masinton Ketua.

Ini terkait tadi menurut saya juga harus ditekankan disini, ditegaskan bahwa terkait *reward and punishment*. Saya cuma kasih contoh saja tadi ada beberapa yang ini. Sampai sekarang itu ini terkait dengan masyarakat Ketua minta waktunya Ketua. Di Kabupaten Tapanuli Tengah daerah pemilihannya Pak Trimedya Panjaitan itu kemarin itu heboh lagi masyarakat karena ada ajudan bupati menekan masyarakat yang itu di oknum Brimob dan saya yakin ini bukan berdiri sendiri tetapi informasi yang saya dapat Bapak Kabarhakam itu memberikan atensi untuk tidak mengembangkan perkara ini. Saya mohon maaf Pak Agus, kami ketika ke Polda kami sudah bilang kenapa posisi Kapolda pada saat itu Pak Agus mensubordinat institusi Kepolisian menjadi kaki tangannya bupati, siapa bupati itu. Kalau dia kriminal sudah hukum harus tegak Pak dan ini saya minta agar juga di Mabes Polri jelas terhadap persoalan ini. Saya akan ikuti terus dan saya sudah dapat Pak Kabarhakam saya dengar informasinya melindungi ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup.

F.PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Ketua Pimpinan.

Ini perlu kita luruskan dalam kaitan masalah karena saya juga ikut memberikan informasi kepada Pak Wakapolri dalam kaitan masalah kasus

itu. Ini persoalan narkoba sedikit saja Ketua supaya kita luruskan karena saya mendapatkan laporan yang sama. Jadi ketika itu ada Anggota Brimob menangkap pelaku narkoba tapi dalam prosesnya justru polisinya yang di proses, kan begitu. Nah makanya saya konfirmasi kepada Pak Wakapolri ketika itu supaya ini persoalan diluruskan begitu jadi tidak ada kaitannya dengan Bupati dan sebagainya, begitu.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Suding nanti kita tindak lanjuti. Sekarang saya baca

3. Komisi III DPR RI meminta Kapolri secara konsisten menjaga disiplin seluruh Anggota Polri serta menindak tegas semua pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota.

F.PD (Ir. H. MULYADI):

Jadi ini biar lebih jelas tadi kan beberapa Anggota menyampaikan seperti Pak ini tadi, Pak, saya lupa tadi. Menerapkan sistem *reward and punishment* itu sudah menyeluruh. Jadi ada penghargaan, ada sanksi kalau yang bersalah ada sanksi, kalau yang baik dia dapat *reward*.

KETUA RAPAT:

Reward and punishment itu sudah aturan internal SOP Polri tapi kasus soal disiplin ini secara umum kita menilai *reward and punishment* itu urusan Pimpinan. Yang berikut tadi Trimedya.

F.PDI-P (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):

Kiri-kiri.

Ketua itu Anggota Polri dilakukan oleh Anggota Polri termasuk merespon apa yang disampaikan oleh Pak Masinton tadi melakukan intervensi terhadap penanganan perkara.

KETUA RAPAT:

Itu nanti kita selesaikan, tidak masuk dalam kesimpulan. Teman-teman kesimpulan dua ini cukup ya.

F.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):

Sedikit Ketua, tambahkan kata oknum.

KETUA RAPAT:

Cukup saya kira.

F.PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E.):

Sebentar Ketua, saya tambah sedikit Ketua.

Ketua tadi ada kalimat humanis Ketua katakan akan dimasukan itu belum masuk. Ada dua kalimat dari Kapolri yang sangat penting untuk di *follow up* dalam kesimpulan. Komisi III untuk mengingatkan kepada jajaran Polri untuk tidak menggunakan senjata ketika beroperasi di lapangan dan bertindak secara humanis ketika menghadapi masyarakat. Mungkin itu bisa tambahan Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya pikir cukup sudah ada SOP-nya maka kita putuskan rapat ini dengan dua kesimpulan utama ini. Saya bacakan kesimpulannya.

1. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar segera mempercepat penuntasan kasus-kasus yang menarik perhatian dan meresahkan masyarakat demi terciptanya rasa aman dan kepastian hukum ditengah masyarakat dan ditindaklanjuti oleh Panja Penegakan Hukum dengan melibatkan Kabareskrim dan Jampidsus serta aparat penegak hukum lainnya.
2. Komisi III DPR RI meminta Kapolri agar secara konsisten menjaga disiplin seluruh Anggota Polri serta menindak tegas segala pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polri.

Saya kira ini saja kesimpulan kita, soal detail teknis lainnya silakan kita nanti berhubungan dengan Kapolri dan jajarannya. Dengan demikian telah selesai seluruh pembicaraan materi rapat hari ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian kegiatan rapat kerja pada hari ini.

Sebelum rapat kerja ini ditutup kami persilakan Saudara Kapolri untuk memberikan *closing statement* kami persilakan.

KAPOLRI (Drs. IDHAM AZIS, M.Si):

Bapak-Bapak Dewan yang kami hormati beserta Ibu,

Terima kasih atas waktu yang telah diberikan selama RDP ini apa pun yang menjadi rekomendasi dari Bapak dan Ibu, masukan serta beberapa pertanyaan akan kami segera menuntaskan dan merealisasikan. Sebelum saya menutup, izinkan saya membacakan pantun “Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi, kalau ada waktu yang panjang bolehlah kita berjumpa lagi”.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

F.PG (Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.):

Izin Pimpinan.

Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Kapolri Bapak Idham Azis bahwa hari ini ternyata beliau berulang tahun yang ke-57 selamat semoga panjang umur sehat selalu dan sukses.

KETUA RAPAT:

Baik rapat kerja hari ini, rapat kita hari ini dan kita tutup disertai dengan ucapan terima kasih kehadiran dari Bapak dan Ibu Anggota Komisi III dan Kapolri, Kapolda Jawa Timur beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri. Rapat kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.15 WIB)

Jakarta, 30 Januari 2019
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP. 19671104 198803 2 001